



Katalog BPS : 1202059

Laporan Kinerja 2019

Badan Pusat Statistik



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Kinerja 2019

Badan Pusat Statistik



LAPORAN KINERJA BPS

2019

No. Publikasi : 02130.2001

Katalog : 1202059

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xvi + 153 Halaman

Naskah:

Bagian Monitoring dan Evaluasi

Gambar Kulit:

Bagian Monitoring dan Evaluasi

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

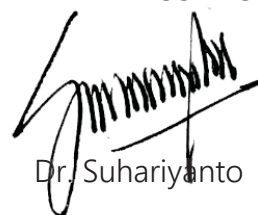


“ Laporan Kinerja (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan LKIP BPS Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap Target Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Pimpinan BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	6
1.4. Potensi dan Permasalahan	9
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	11
Bab II. Perencanaan Kinerja	15
2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015 - 2019	15
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2019	22
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	33
3.1. Capaian Kinerja BPS	33

3.2	Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2019	61
3.3	Capaian Kinerja BPS terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2019	70
3.4	Prestasi Tahun 2015-2019	80
3.5	Upaya Efisiensi BPS 2019	84
3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2019	88
Bab IV. Penutup		93
Lampiran		97

DAFTAR TABEL

Tabel

1.	Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 (Miliar Rupiah)	8
2.	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019	21
3.	Target Kinerja BPS 2019	22
4.	Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator	25
5.	Rata-rata Capaian Kinerja BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019	35
6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data Terhadap Kualitas Data BPS Tahun 2019	41
7.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Hubungan Dengan Pengguna Data (<i>user engagement</i>) Tahun 2019	45
8.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik Tahun 2019.....	51
9.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Tahun 2019	53
10.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Tahun 2019	56

11.	Perbandingan Target Renstra dengan Target dan Realisasi PK serta Capaian Kinerja BPS Tahun 2019	62
12.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2019	85
13.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2019	86
14.	Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019	88
15.	Realisasi Pagu BPS menurut jenis Belanja TA 2019 (Miliar Rupiah)	89
16.	Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2019 (Milyar Rupiah).....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.	Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik	5
2.	Komposisi SDM BPS Menurut Tingkat Pendidikan	6
3.	Nilai Inti BPS	20
4.	Capaian Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran BPS Tahun 2014-2019	34
5.	Target dan Realisasi Indikator Persentase Konsumen yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik Tahun 2018 dan 2019	39
6.	Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Tiga Dimensi Kualitas Data Statistik	39
7.	Target dan Realisasi Indikator Persentase Konsumen yang Puas Akan Layanan Data BPS Tahun 2018 dan 2019	44
8.	Profil Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2019	47
9.	Target dan Realisasi Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun Tahun 2018-2019	49
10.	Target dan Realisasi Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK Tahun 2018-2019.....	59
11.	Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Tahun 2019.....	73
12.	Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya Tahun 2019.....	77

13. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Tahun 2019	79
14. Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2015-2019	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Renstra BPS 2015 - 2019	97
2.	Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 2019	100
3.	Pengukuran Capaian Kinerja 2019	104
4.	Pernyataan Perubahan Target PK Terhadap Renstra	110
5.	Pelaksanaan <i>Press Release</i> Tahun 2019	111
6.	Jumlah Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Tahun 2019	116
7.	Jumlah Pegawai BPS Tahun 2019	119
8.	Pernyataan Telah Direviu	125
9.	Prestasi yang diraih BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2019.....	126

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019.

Secara umum kinerja BPS tahun 2019 dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,54 persen naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 112,04 persen. Capaian sasaran strategis tahun 2019 sebesar 103,06 persen sedikit menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 105,57 persen. Dari sisi pelayanan BPS terhadap pengguna data menunjukkan

peningkatan, di tahun 2019 konsumen yang puas akan layanan data BPS sebesar 99,01 persen, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 98,11 persen. Demikian pula pada indikator tingkat konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik yang naik menjadi sebesar 98,33 persen dibanding capaian tahun 2018 sebesar 96,96 persen. Meski demikian hal ini menjadi motivasi sekaligus tantangan BPS di tahun berikut untuk terus meningkatkan kualitas data yang disajikan.

Upaya BPS untuk semakin memudahkan akses data bagi para pengguna juga membuahkan hasil. Sebanyak 98,86 persen konsumen data merasa puas terhadap akses data BPS meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 96,72 persen. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS di tahun 2019 sebanyak 3,12 juta atau mengalami peningkatan sebesar

34,48 persen dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2,32 juta pengunjung.

Di sisi lain, pemanfaatan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi oleh pengguna data persentasenya mencapai 44,29 persen, jauh meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 24,45 persen. Data yang up to date sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Untuk itu BPS dituntut untuk terus meningkatkan kualitas serta mempercepat waktu penyajian data.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2019 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.247,07 miliar dengan realisasi sebesar Rp 4.977,39 miliar (94,86 persen). Realisasi anggaran ini meningkat jika dibandingkan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 4.777,88 miliar dan realisasi Rp 4.354,92 miliar rupiah (91,15 persen). Bila dibandingkan dengan capaian kinerja baik kinerja

tujuan maupun kinerja sasaran strategis dapat dikatakan BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan BPS. Tiga dari empat program dan kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggarannya.

Di tahun 2019, kinerja BPS yang sebelumnya telah mendapatkan apresiasi dari Presiden dan Wakil Presiden RI juga mendapatkan peringkat TOP 45 dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Inovasi RADAR PADI membahas tentang data produksi padi menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan teknologi spasial hasil kerjasama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi

Geospasial (BIG). Dengan dirilisnya data tersebut maka polemik data produksi padi yang telah terjadi lebih dari 20 tahun dapat diakhiri dan Presiden RI juga menyampaikan bahwa ke depan data BPS menjadi acuan pengambilan kebijakan pemerintah. Satuan kerja BPS di daerah juga banyak sekali yang mendapatkan penghargaan dari instansi luar sebagai hasil kerja keras yang dilakukan selama 2019.

01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama Tahun 2019.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki BPS adalah:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya;

4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik;
 - b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS terdiri dari sebagai berikut:

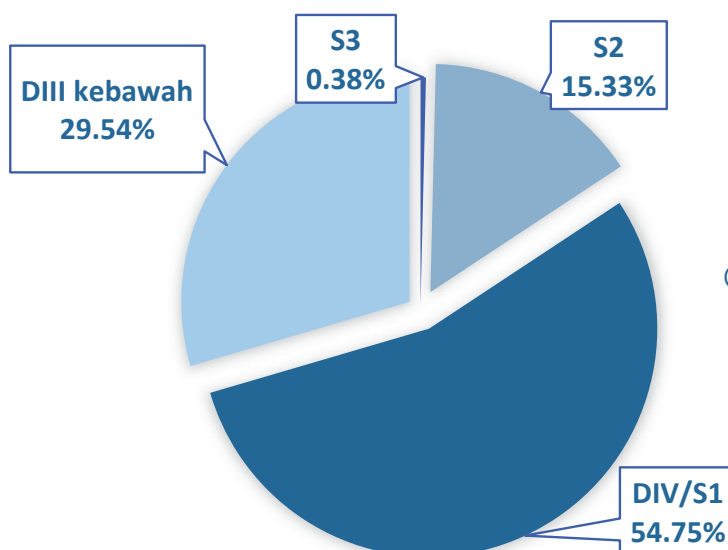
1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
4. Deputi Bidang Statistik Sosial
5. Deputi Bidang Statistik Produksi
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
8. Inspektorat Utama
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
10. Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Poltek Statistika STIS)
11. Instansi Vertikal (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota)



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, BPS telah ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Jika dilihat pada Gambar 2, kualitas SDM BPS relatif baik. Dari total 16.446 pegawai, persentase SDM yang berpendidikan DIII ke bawah sebesar 29,54 persen, DIV/S1 sebesar 54,75 persen, berpendidikan S2 sebesar 15,33 persen, dan S3 sebesar 0,38 persen. Proporsi SDM yang berpendidikan DIII ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang semula 33,30 persen. Penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan komposisi SDM yang berpendidikan DIV/S1, S2 maupun S3 seiring dengan berjalannya tahun sejak 2015 hingga 2019. Di tahun 2015 SDM berpendidikan DIV/S1 ada sebanyak 47,27 persen lalu bergerak cenderung meningkat menjadi 54,75 persen di tahun 2019 . Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan.



Gambar 2. Komposisi SDM BPS Menurut Tingkat Pendidikan

Selain mendidik calon pegawai melalui Politeknik Statistika STIS yang merupakan sekolah kedinasan milik BPS, peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar ataupun dengan memberikan ijin belajar bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri.

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Tercatat sebanyak 5.099 pegawai atau sebesar 31 persen pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4.076 pegawai atau mengalami kenaikan sebesar 25,10 persen. Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS sebesar 92,37 persen merupakan pejabat fungsional statistisi dengan rincian 2.282 pegawai merupakan statistisi tingkat terampil dan 2.428 pegawai merupakan statistisi tingkat ahli. Telah terjadi kenaikan jumlah statistisi bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Sejak tahun 2017 BPS telah memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional statistisi ahli utama serta di tahun 2019 BPS juga sudah memiliki Widyaiswara Utama sebanyak 2 orang. Secara khusus dari 2.428 statistisi tingkat ahli, sebanyak 1.539 pegawai merupakan Statistisi Ahli Pertama, 816 pegawai merupakan Statistisi Ahli Muda, 72 pegawai merupakan Statistisi Ahli Madya dan 1 pegawai merupakan Statistisi Ahli Utama. Peningkatan pegawai

yang menduduki jabatan fungsional diantaranya merupakan hasil program *impassing* bagi pegawai serta meningkatnya minat pegawai untuk menjadi pejabat fungsional.

Pada tahun 2019, BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.247,07 miliar. Pagu tersebut dibagi ke dalam satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 2.145,56 miliar dan tiga Program non teknis/generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 2.848,09 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 244,80 miliar, dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) sebesar Rp 8,62 miliar. Rincian Pagu anggaran BPS tahun 2019 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 (Miliar rupiah)

Program	Hibah Langsung Dalam Negeri	Hibah Langsung Luar Negeri	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rupiah Murni	Total
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)
01 DMPTTL	-	-	7,40	2.840,70	2.848,09
02 PSPA	-	-	-	244,80	244,80
03 PPAA	-	-	-	8,62	8,62
04 PPIS	2,82	6,38	33,48	2.102,87	2.145,56
Total	2,82	6,38	40,88	5.196,99	5.247,07



1.4. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peran BPS sebagai lembaga statistik pemerintah telah ditopang oleh Politeknik Statistika STIS yang telah menghasilkan mahasiswa ahli statistik untuk memenuhi kebutuhan pegawai BPS serta rekrutmen pegawai yang tidak hanya ahli statistik tetapi juga bidang lain seperti teknologi informasi, ekonomi, hukum dsb. Dalam melaksanakan tugasnya BPS juga memiliki *Core Value* "PIA"; Profesional, Integritas dan Amanah yang telah tertanam pada diri pegawai BPS. *Core Value* ini yang telah menjadikan semangat insan BPS untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna data dasar.

Peran BPS semakin meningkat dan diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat,

maupun pihak luar negeri. Instansi/Kementerian semakin banyak yang bekerja sama dengan BPS untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa data BPS semakin dipercaya. Namun disisi lain, BPS harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. Terlebih bahwa Pemerintah Daerah sudah memiliki satuan perangkat pemerintah daerah urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data.

Selain peningkatan peran BPS sebagai pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah bagaimana cara untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun data tingkat kepuasan pengguna data BPS sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi namun harus tetap senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir. Prosedur penjaminan kualitas harus dapat diterapkan disemua kegiatan BPS secara bertahap, penerapan teknologi informasi sehingga data semakin cepat tersaji dan meminimalkan *error*/kesalahan data. Era Big Data tidak mungkin dihindari, oleh sebab itu BPS harus dapat mengikuti dan menggunakan data perkembangan global

yang sangat cepat dengan menerapkan perangkat teknologi yang efisien, efektif serta ekonomis.

Disisi lain, semakin banyak survei yang dilakukan BPS konsekuensinya adalah responden yang enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat responden bosan dan bahkan menolak untuk didata. Untuk itu BPS mengarah pada integrasi survei melalui program Statcap Cerdas yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan hasil akhir yang ingin dicapai adalah data yang digunakan BPS semakin kredibel, andal dan memberi manfaat bagi semua user. data.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS, potensi dan

permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.

- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2019.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2019, Capaian Kinerja BPS terhadap Pelaksanaan Janji Presiden/Wakil Presiden di TA 2019, Prestasi tahun 2019, Upaya Efisiensi BPS 2019, dan Realisasi Anggaran tahun 2019.
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

02

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. BPS turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik. Visi yang disusun BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:



“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007). Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.

Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU No. 16 Tahun 1997).

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.



Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan” (UU No. 16 Tahun 1997). Di dalam undang-undang tersebut, BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya

pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. Pengembangan sistem informasi statistik;
- f. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.



Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.



Gambar 3. Nilai Inti BPS

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS1.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4.1. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
	SS4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
	SS4.4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

2.1. Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2019

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penandatanganan PK oleh Kepala BPS dilakukan pada tanggal 23 Maret 2019.

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu	Aktivitas	152
1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas		
Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	Aktivitas	4

Tabel 3. Target Kinerja BPS 2019

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik		
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	86,50
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)		
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	1.600.000
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	30,00
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	86,00
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik		
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	500
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN		
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	500
Jumlah Instansi/ Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	10
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	10
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel		
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik		

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70,00
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	Persen	67,00
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	39,00
4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	Point	78,00
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	Point	79,00
Persentase Satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	Persen	100,00
4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan		
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
4.4. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS		
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	100,00
Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	90,00
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00

Tabel 3. Target Kinerja BPS 2019
(lanjutan)

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS. Peranan unit kerja Eselon I pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 4.

Tujuan/Sasaran/Indikator		Sesama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disjias	Kedeputian NAS	Inspektorat Utama
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas								
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS								
1.1.1	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	
1.1.2	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		*	*	*	*	*	
1.1.3	Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu		*	*	*	*	*	

Tabel 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran/Indikator		Setama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disjas	Kedeputian NAS	Inspektorat Utama
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas								
1.2.1	Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas						*	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik								
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS		*					
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)								
2.1.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS		*					
2.1.2	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		*					
2.1.3	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS		*	*	*	*	*	
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik								
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		*					
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN								
3.1.1	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		*					
3.1.2	Jumlah Instansi/ Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		*					
3.1.3	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi		*					

Tabel 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator (lanjutan)

Tujuan/Sasaran/Indikator		Setama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disjias	Kedeputian NMS	Inspektoral Utama
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel								
	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*						*
4.1. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik								
4.1.1	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	*						
4.1.2	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	*						
4.1.3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	*						
4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS								
4.2.1	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	*						*
4.2.2	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	*	*	*	*	*	*	*
4.2.3	Persentase Satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	*						*
4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan								
4.3.1	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*						*
4.4. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana BPS								
4.4.1	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	*						

Tujuan/Sasaran/Indikator		Sestama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disjias	Kedeputian NAS	Inspektorat Utama
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.4.2	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	★						
4.4.3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	★						

Keterangan: : Penanggung Jawab

 : Kontributor

Sasaran 1.1 “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”

Pada tabel 4 terlihat bahwa seluruh kedeputian bertanggung jawab terhadap tujuan 1 yaitu “Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas” dengan indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Seluruh kedeputian bertanggung jawab terhadap 2 (dua) indikator yang berada pada sasaran 1.1 yaitu indikator 1.1.1 dan 1.1.2. Sedangkan indikator 1.1.3 yaitu “Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu”, penanggung jawabnya adalah seluruh kedeputian kecuali MIS yang merupakan penunjang.

Sasaran 1.2 “Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas”

Penanggung jawab indikator 1.2.1 yaitu “Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas” adalah kedeputian NAS.

Sasaran 2.1 "Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)"

Tiga indikator pada sasaran ini yaitu 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3 merupakan tanggungjawab kedeputian MIS karena berhubungan dengan teknologi informasi dan penyajian data. Untuk indikator 2.1.3 seluruh kedeputian ikut sebagai penunjang.

Sasaran 3.1 "Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN"

Sama seperti pada sasaran 2.1, 3 (tiga) indikator pada sasaran ini yaitu 3.1.1, 3.1.2 dan 3.1.3 merupakan tanggungjawab kedeputian MIS karena berhubungan dengan penyajian dan konsultasi data.

Sasaran 4.1 "Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik"

Ke-3 indikator pada sasaran "Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik" yaitu 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan kompetensi pegawai dan jabatan fungsional.

Sasaran 4.2 "Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS"

Dua indikator pada sasaran "Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" yaitu indikator 4.2.1 dan 4.2.2 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan penyelenggaraan SAKIP dan RB. Untuk indikator 4.2.1 yaitu "Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB" ditunjang oleh Irtama sedangkan indikator 4.2.2 yaitu "Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB" ditunjang oleh seluruh eselon I BPS. Indikator 4.2.3 yaitu "Persentase Satker yang mendapatkan nilai evaluasi

SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)" merupakan tanggungjawab Irtama yang ditunjang oleh Kesestamaan.

Sasaran 4.3 "Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan"

Indikator 4.3.1 yaitu "Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK" merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan laporan keuangan dan ditunjang oleh Irtama. Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini BPK terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- Tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*) skor 25
- Tidak Wajar skor 50
- Wajar Dengan Pengecualian skor 75
- Wajar Tanpa Pengecualian skor 100

Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100).

Sasaran 4.4 "Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS"

Ketiga indikator pada sasaran "Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS" yaitu 4.4.1, 4.4.2 dan 4.4.3 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BPS.



03

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

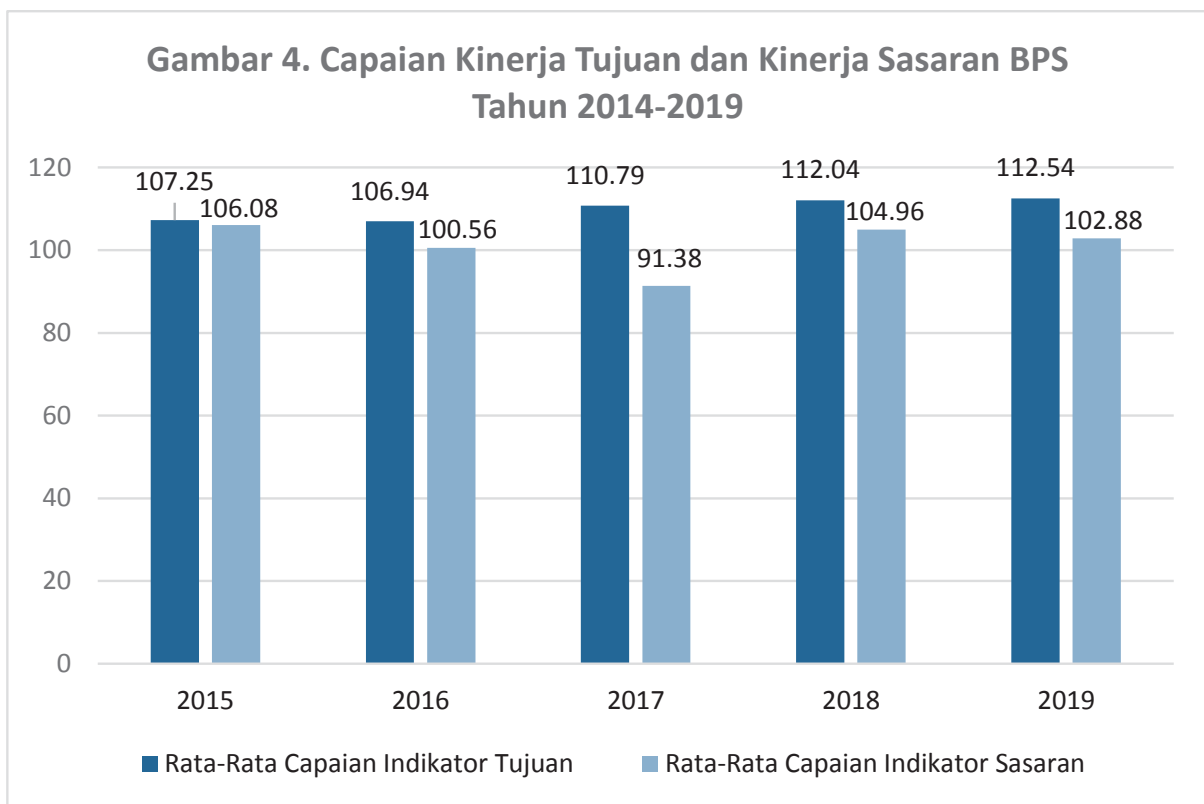
3.1 Capaian Kinerja BPS

Capaian kinerja BPS Tahun 2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama 1 (satu) tahun. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Hasil monitoring capaian kinerja menunjukkan rata-rata kinerja tujuan BPS pada tahun 2019 sebesar 112,54 persen, naik dibandingkan capaian kinerja tujuan tahun 2018 sebesar 112,04 persen. Sementara itu, rata-rata kinerja sasaran menurun dari 104,96 persen di tahun 2018 menjadi 102,88 persen di tahun 2019. Keadaan capaian kinerja BPS untuk kurun waktu 2014-2019 dapat dilihat pada Gambar 4.

Dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak 2015, capaian kinerja tujuan hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2016 yang sempat mengalami sedikit penurunan. Meskipun demikian, peningkatan capaian tersebut cenderung bergerak melambat. Capaian tujuan di tahun 2019 merupakan yang tertinggi sejak lima tahun terakhir sedangkan di tahun 2016 merupakan yang paling rendah.

Sementara itu, perkembangan capaian kinerja sasaran cenderung bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2015 memiliki capaian tertinggi dengan nilai 106,08 persen kemudian menurun di dua tahun berikutnya hingga titik terendah di tahun 2017 dengan nilai 91,38 persen. Di tahun 2018 kembali meningkat signifikan lalu kembali menurun di tahun 2019. Rata-rata capaian kinerja menurut tujuan dan sasaran di tahun 2019 beserta jumlah indikatornya dijabarkan pada Tabel 5.



Jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan khususnya pada indikator yang digunakan. Perubahan tersebut merujuk kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2017 dan yang terakhir Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2019. Perbedaan indikator tersebut tergambar dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%)

Tujuan/Sasaran/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas		107,34	111,63	117,18	114,07	115,68
1.1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	100,79	101,26	96,20	101,93	105,61
1.2	Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	-	-	100,00	100,00	100,00
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik		101,67	106,15	105,98	114,08	114,46
2.1	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	104,75	97,20	89,65	114,08	118,32
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3.1	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	120,00	120,00	47,40	120,00	120,00
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel		100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
4.1	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	97,44	96,75	91,31	107,82	100,50
4.2	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	102,83	105,24	104,78	106,05	104,76
4.3	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	-	-	105,15	102,76	103,37
Rata Rata Tujuan		107,25	106,94	110,79	112,04	112,54
Rata Rata Sasaran		106,08	100,56	91,38	105,57	102,88

* - : tidak tersedia

Jika dilihat berdasarkan tujuan dan sasaran indikatornya, capaian dari tahun ke tahun cenderung bergerak fluktuatif. Tujuan pertama yakni "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas" memiliki capaian yang seluruhnya berada di atas 100 persen. Sedangkan capaian sasaran di dalamnya seluruhnya memiliki capaian di atas 100 persen kecuali pada sasaran "Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS" di tahun 2017. Meskipun sempat turun di 2017, sasaran tersebut kembali meningkat hingga titik tertinggi di 2019. Sedangkan untuk sasaran "Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas", BPS dapat mempertahankan ketercapaiannya selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini berarti bahwa sampai akhir tahun renstra di 2019, BPS mampu menjaga peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas.

Pergerakan yang serupa juga terlihat pada capaian tujuan dan sasaran kedua. Meskipun capaiannya sempat turun di tahun 2017 dan 2018 namun BPS dapat kembali meningkatkan kinerjanya di tahun 2019. Bahkan capaian sasaran "Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)" mencapai titik tertinggi di 2019 sebesar 118,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu meningkatkan pelayanan khususnya dalam hubungannya dengan pengguna data.

Pada tujuan ketiga "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik" baik tujuan maupun sasaran selama lima tahun renstra hampir seluruhnya memiliki realisasi yang jauh melebihi target sehingga capaiannya mencapai 120 persen. Hanya ada satu sasaran di tahun 2017 yang tidak mencapai 100 persen dengan angka capaian yang cukup rendah sebesar 47,40 persen. Hal ini terjadi karena penentuan target yang terlampaui tinggi yang melebihi



kemampuan BPS pada indikator-indikator yang menyusun sasaran tersebut sehingga capaian kerjanya rendah. Indikator-indikator tersebut antara lain "Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi" dan "Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi". Adapun pada tahun-tahun berikutnya, telah dilakukan penyesuaian target pada indikator-indikator tersebut sehingga capaian yang diraih dapat ditingkatkan kembali.

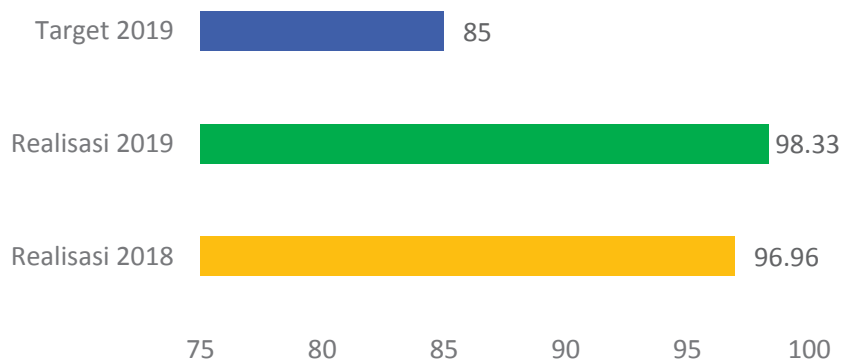
Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tujuan keempat, "Peningkatan birokrasi yang akuntabel" diukur berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut. Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2014, BPS sempat mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2016 atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2015. Namun kondisi tersebut segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga di tahun berikutnya BPS mampu mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga akhir tahun restra 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tiga tahun sebelumnya.

Secara garis besar, hampir seluruh sasaran pada tujuan empat telah melampaui angka 100 persen khususnya selama tiga tahun terakhir. Meskipun sempat terjadi penurunan pada keempat sasaran, namun di akhir tahun 2019 BPS mampu mempertahankan nilai capaian di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPS untuk tujuan empat dapat dikatakan baik..

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Agar kualitas data BPS semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik semakin ditingkatkan.

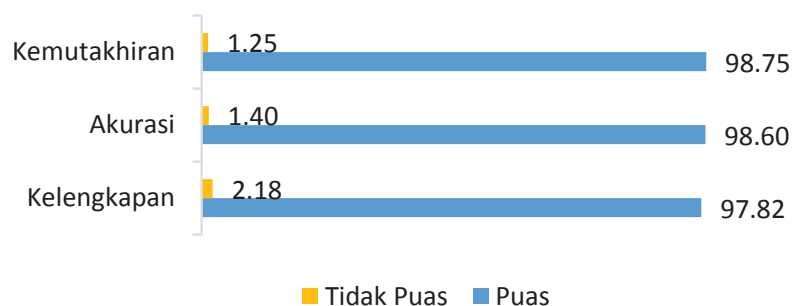
Keberhasilan tujuan BPS dalam aspek kualitas data diukur melalui satu IKU yaitu indikator "Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik". Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa 98,33 persen konsumen merasa puas terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan BPS. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,00 persen, kinerja BPS untuk tujuan pertama telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 115,68 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, konsumen yang merasa puas sebesar 96,96 persen sehingga kinerja BPS untuk tujuan ini mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen.

Upaya yang dilakukan BPS untuk meningkatkan kualitas data diantaranya memperbaiki metodologi pengumpulan data seperti penggunaan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk perbaikan data produksi padi dari yang semula menggunakan metode *Eye Estimate*. Inovasi tersebut berhasil masuk dalam TOP 45 inovasi pelayanan publik. Metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) juga diaplikasikan pada beberapa survei sehingga isian data dapat divalidasi sejak awal pencacahan. Upaya lainnya yakni Pengembangan Sistem Pelayanan Statistik (Silastik) untuk membantu pengguna data dalam melakukan pembelian ataupun konsultasi data dan Pembangunan Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) untuk memudahkan proses pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik.



Gambar 5. Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2018 dan 2019

Pengukuran kepuasan terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan, dilakukan terhadap 3 (tiga) dimensi yaitu kemutakhiran, akurasi, dan kelengkapan. Persentase kepuasan konsumen data terhadap kedelapan dimensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap 3 (tiga) Dimensi Kualitas Data Statistik

SS1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS

SS1.1. diukur melalui 3 (tiga) IKU. Rata-rata capaian kinerja SS1.1. sebesar 105,61 persen. Dari 3 (tiga) indikator pada sasaran ini, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya tidak sesuai target yaitu indikator "Jumlah Release data statistik yang tepat waktu". Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya sudah sesuai atau melampaui target. Mulai meningkatnya keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS menjadi kendala untuk memperoleh data yang berkualitas. Di sinilah diperlukan kegiatan sosialisasi, koordinasi yang terus menerus dilakukan terhadap responden yang dapat menghasilkan hubungan yang baik dengan sumber data yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas data tersebut.

Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Indikator pertama yaitu "Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik" memiliki capaian paling tinggi yaitu 115,68 persen. Sedangkan indikator ketiga "Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu" merupakan indikator yang capaiannya paling rendah yaitu 98,03 persen. Untuk indikator-indikator yang capaiannya jauh melampaui target perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi agar penentuan target tidak terlalu rendah sedangkan indikator yang capaiannya di bawah 95 persen perlu upaya yang lebih besar untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Capaian per indikator dapat dilihat pada Tabel 6.

Indikator "Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik" selain merupakan indikator dari tujuan pertama, juga merupakan indikator pertama dari SS1.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS” Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019(%)	Capaian 2018 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	85	98,33	115,68	114,07	1,61
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90	92,82	103,13	98,69	4,44
Jumlah <i>release</i> data Statistik yang tepat waktu	152	149	98,03	110,71	-12,68
Rata rata Capaian Kinerja			105,61	101,93	3,68

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data statistik, sudah sewajarnya jika masyarakat menjadikan BPS rujukan utama dalam mencari informasi statistik. Hal tersebut tercermin dari hasil SKD yang menunjukkan sebanyak 92,82 persen konsumen menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Dengan demikian capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut mencapai 103,13 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, kondisi tersebut naik sebesar 4.44 persen. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian BPS sebagai rujukan utama dalam mencari informasi diantaranya adalah masih perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada semua lapisan

masyarakat terutama ragam data yang dihasilkan BPS sehingga ketika pengguna data mencari data sudah mengetahui ragam data yang sudah ada di BPS sehingga mereka akan langsung mencarinya di BPS atau menjadi rujukan utama. Langkah kedepan BPS harus lebih mampu memberikan jaminan peningkatan kualitas, pemutakhiran data serta ketepatan waktu penyajian data sehingga para pengguna data akan menggunakan data BPS sebagai rujukan utama ketika mereka merencanakan/melakukan evaluasi.

Jumlah Rilis data Statistik yang tepat waktu

Dalam rangka menyampaikan informasi dan data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara tepat kepada para pengguna data, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program *Advance Release Calendar (ARC)*. Program ini menyediakan informasi jadwal penerbitan semua produk BPS yang di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu yang ditayangkan dalam *website* BPS. Maksud dan tujuan penyusunan ARC BPS antara lain:

1. Menjamin terwujudnya seri publikasi BPS yang baik, dengan frekuensi penerbitan yang terjadwal dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat *ad hoc*.
2. Mengontrol agar publikasi BPS dapat diterbitkan secara konsisten dan *Subject Matter* terkait dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi apa saja yang akan diterbitkan, melalui tayangan dalam *website* BPS.
4. Memberikan kepastian pada publik (pengguna data BPS) mengenai ketersediaan data dan periodisitas data BPS.

5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program ARC BPS.

ARC BPS menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ARC Publikasi dan ARC Berita Resmi Statistik (BRS). Sebagaimana pada tujuan Program ARC kelima maka data pada ARC menjadi rujukan untuk mengukur IKU BPS yaitu "Jumlah *Release* data Statistik yang tepat waktu".

Sebanyak 152 aktivitas *release* data ditargetkan sesuai jadwal pada tahun 2019, pada kenyataannya hanya 149 (98,03 persen) yang dapat memenuhi target tersebut. Realisasi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 110,71 persen, artinya terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 12,68 persen. Untuk informasi yang lebih lengkap, daftar data yang di *release* pada tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6.

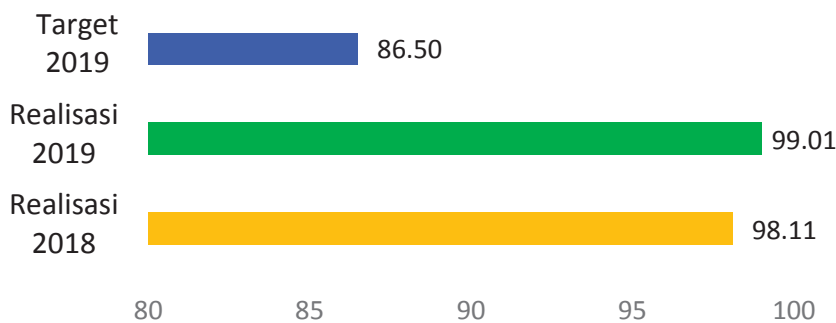
SS1.2.: Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi salah satunya adalah belum optimalnya informasi pendukung kerangka sampel untuk menghasilkan data berkualitas. Solusi yang telah diterapkan adalah dengan melakukan revisi jadwal dan melakukan penggantian sampel.

Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas

Indikator "Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas" menggambarkan jumlah kegiatan statistik yang mengumumkan informasi terkait penjaminan kualitas. Capaian indikator ini pada Tahun 2019 adalah 100 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 4 aktivitas.

Sebagai salah satu agen pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga, dunia usaha, dan masyarakat. Berbagai pendekatan dan sistem telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima untuk pengguna data statistik tanpa membedakan terhadap semua pihak. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup penyempurnaan pelayanan statistik, pembuatan *advanced release calendar*, dan pengembangan perpustakaan. Selain itu, BPS terus menyempurnakan situs *website* BPS dan menambah muatan data yang diunggah supaya pengguna data dapat memperoleh data dengan mudah, cepat, dan murah.



Gambar 7. Target dan Realisasi Indikator “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS” tahun 2018 dan 2019

Pengukuran pencapaian BPS dalam rangka mencapai tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,” dinilai melalui satu indikator yaitu “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS”. Sebagaimana indikator sebelumnya yang terkait dengan konsumen, untuk mendapatkan besaran datanya diperoleh melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS pada tahun 2019 mencapai 99,01 persen sedangkan targetnya sebesar 86,50 persen artinya capaian kinerja indikator ini mencapai 114,46 persen. Persentase konsumen yang puas akan layanan BPS di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 98,11 persen.

SS2.1.: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)", dengan pengukuran keberhasilannya dinilai oleh 3 (tiga) IKU. Pada tahun 2019 kinerja sasaran tersebut berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 118,32 persen. Data dan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian masing-masing indikator dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 dan penjelasan di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*) Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019(%)	Capaian 2018 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.600.000	3.118.501	120,00	120,00	0
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	30	44,29	120,00	81,50	38,50
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	86	98,86	114,95	114,08	0,87
Rata rata Capaian Kinerja /Perubahan			118,32	105,19	13,13

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*

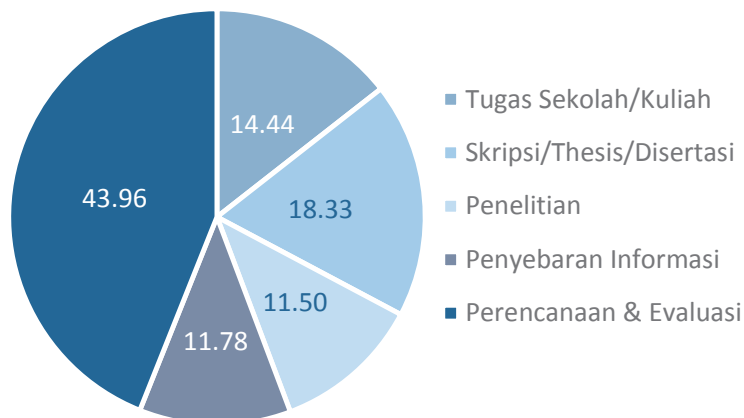
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS (www.bps.go.id) pada tahun 2019 mencapai 3.118.501 pengunjung jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.322.354 pengunjung, juga jauh lebih besar dari target PK yang sebanyak 1.600.000 pengunjung. Namun jumlah tersebut hanya mencakup 30,60 persen dari seluruh konsumen yang memperoleh pelayanan BPS. Hal ini menandakan bahwa kedepan BPS tetap perlu meningkatkan target pengunjung *website* BPS.

Peningkatan jumlah pengunjung eksternal ini merupakan hasil dari beberapa strategi yang dilakukan BPS seperti sosialisasi kegiatan maupun *website* BPS melalui media sosial. Selain itu, BPS juga senantiasa membina hubungan baik dengan media massa, utamanya pada saat kegiatan rilis data maupun penjelasan data-data pemerintah. Dengan semakin seringnya BPS muncul dalam pemberitahuan media massa diharapkan semakin banyak lapisan masyarakat yang mengetahui dan mengakses data BPS melalui *website*.

Data yang disajikan pada *website* digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti untuk menyelesaikan tugas sekolah pelajar, penelitian, kepentingan penyebaran informasi ataupun perencanaan dan evaluasi. Hal yang perlu lebih ditingkatkan adalah ketersediaan data hendaknya lebih diorientasikan kepada kebutuhan para peneliti maupun wiraswasta sehingga mereka akan lebih banyak mengakses data BPS yang dapat diartikan adanya peningkatan kualitas data untuk pengembangan keilmuan maupun keperluan bisnis.

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Data capaian untuk indikator “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” diperoleh melalui SKD. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 30 persen konsumen menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, hasil SKD menunjukkan realisasinya sebesar 44,29 persen lebih tinggi dari pada realisasi tahun 2018 yang hanya sebesar 24,45 persen. Artinya capaian kinerja IKU tersebut di tahun 2019 adalah sebesar 120,00 persen atau meningkat 81,14 persen dibandingkan tahun 2018. Komposisi penggunaan data BPS oleh konsumen menurut hasil SKD dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Profil Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2019 (SKD 2019)

Salah satu yang harus ditingkatkan adalah *time reference* data terkini yang sangat dibutuhkan oleh para pengguna data agar indikator ini dapat tercapai. Data yang *up to date* sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. BPS dituntut untuk mampu mempercepat waktu penyajian data. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh BPS diantaranya dengan menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal*

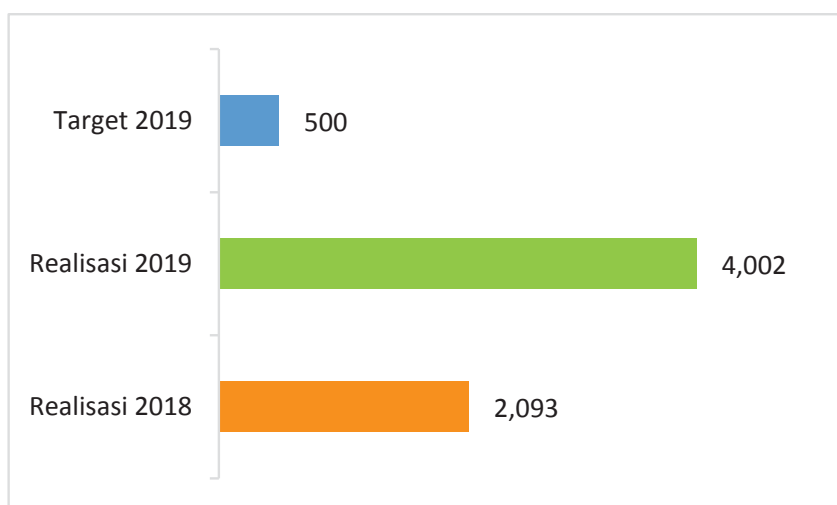
Interviewing). Proses pencatatan survei/sensus yang menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan server sehingga dapat mempercepat proses pengolahan data. Harapannya waktu penyajian data akan lebih cepat.

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Keberhasilan BPS dalam meningkatkan kapasitas akses data dapat diukur melalui IKU "Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS".

Hasil SKD menunjukkan jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 98,86 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 96,72 persen serta masih lebih tinggi dibandingkan target PK sebesar 86,00 persen. Dengan kata lain capaian kinerja indikator ini sebesar 114,95 persen. Upaya BPS dalam meningkatkan kepuasan terhadap akses data BPS diantaranya membuat tampilan *website* BPS menjadi lebih menarik dan mudah dalam mengunduh data serta peningkatan layanan melalui Pusat Layanan Statistik Terpadu (PST).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 3 dan Pasal 4 mengamanatkan perlunya diwujudkan dan dikembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Pasal ini selanjutnya diturunkan menjadi Perka Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Salah satu langkah untuk mewujudkan SSN adalah diwajibkannya instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda. Langkah tersebut salah satunya digambarkan dalam bentuk indikator "Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun" yang merupakan IKU dari tujuan ketiga BPS.



Gambar 9. Target dan Realisasi Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun Tahun 2018-2019

Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun

Selama tahun 2019 jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun sebanyak 4.002 metadata. Jumlah ini jauh lebih besar dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 500 metadata serta jauh melebihi realisasi tahun 2018 sebanyak 2.093 metadata. Sehingga capaiannya adalah 120 persen. Peningkatan jumlah terjadi karena diperluasnya cakupan wilayah pengumpulan dari tingkat provinsi menjadi tingkat kabupaten/kota serta adanya hasil Sensus Ekonomi 2016.

Jumlah Instansi/Institusi yang Mendapatkan Rekomendasi

Indikator “Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi” mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi di tahun 2019 sebanyak 19 instansi dari target sebanyak 10 instansi. Sehingga capaiannya mencapai 120 persen. Meskipun realisasinya telah melampaui target, namun kedua angka tersebut masih tergolong rendah dikarenakan tingkat kesadaran Kementerian/Lembaga untuk mau mengajukan permohonan rekomendasi ke BPS sebelum melakukan kegiatan survei juga masih rendah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kemudian PP No 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik maka setiap instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan survei harus mendapatkan rekomendasi dari BPS terlebih dahulu. BPS akan melakukan telaah rencana teknis kegiatan survei yang akan dilakukan termasuk memberikan saran/masukan sesuai dengan kaidah statistik pemerintahan. BPS sudah sering melakukan sosialisasi peraturan tersebut ke Kementerian/Lembaga, namun K/L

yang mengajukan rekomendasi masih sangat sedikit. Kendala yang dihadapi adalah kesadaran Kementerian/Lembaga untuk mau mengajukan permohonan rekomendasi ke BPS sebelum melakukan kegiatan survei.

Jumlah Instansi yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi

Target indikator “Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi” selaras dengan indicator sebelumnya. Realisasi di 2019 sebanyak 19 instansi yaitu instansi yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS dan mereka juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan target sebanyak 10 instansi maka capaian tahun 2019 adalah sebesar 120 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar 35,71 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif Di Bidang Statistik Tahun 2019

Sasaran/IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019(%)	Capaian 2018(%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN					
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	500	4.002	120,00	120,00	0
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi	10	19	120,00	120,00	0
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	10	19	120,00	120,00	0

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut berdasarkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
3. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dibahas pada sasaran SS4.3.

SS4.1.: Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Beberapa kendala yang dialami adalah belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai prosedur dan peraturan kepegawaian dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses di bidang administrasi kepegawaian.

Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih baik kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi pelayanan publik.

Sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik” diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) IKU. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2019 mencapai 100,50 persen. Penjelasan tentang capaian masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik Tahun 2019”

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	70	70	100,00	112,04	-12,04
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	67	68	101,49	91,43	10,06
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	39	39	100,00	120,00	-20,00
Rata-rata Capaian Kinerja			100,50	107,82	-7,32

Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu

Indikator “Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu” mengalami capaian kinerja yang sangat baik yaitu 100,00 persen dari target yang yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2019 sebesar 70 persen. Namun demikian, capaian tersebut menurun sebesar 12,04 persen jika dibandingkan tahun 2018. Pelatihan teknis BPS merupakan salah satu upaya BPS untuk senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik. Selain teknis, pelatihan nonteknis juga telah dilakukan BPS seperti pelatihan SAKIP dan *workshop* sekretaris.

Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer

Untuk mewujudkan SSN, penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal. Koordinasi akan lebih mudah jika sumber daya yang melaksanakannya mempunyai keahlian yang sama dalam hal ini statistik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) Nomor 19 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya menugaskan BPS sebagai Instansi Pembina Jabatan tersebut. Selain itu, BPS juga merupakan Instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata komputer sebagaimana tertera dalam Keputusan MenPAN dan RB Nomor 66JKEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Keberhasilan tugas ini diukur melalui IKU “Jumlah Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer pada Kementerian/Lembaga”.

Indikator ini mengalami capaian kinerja yang cukup baik yaitu 101,49 persen di tahun 2019, meningkat 10,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Target yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2019 terkait indikator Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer sebesar 67 persen dan tercapai 68 persen. Realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 64 persen. Masih kurangnya sosialisasi maupun publisitas tentang jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer diantaranya yang mengakibatkan masih rendahnya pegawai instansi luar BPS tertarik menjadi statistisi maupun pranata komputer. Disamping memperbaiki rincian pekerjaan dan angka kredit, kedepan BPS diharapkan semakin menambah sosialisasi jabatan fungsional statistisi maupun pranata komputer ke K/L/instansi lain melalui pertemuan-pertemuan atau membuat publisitas di media massa sehingga semakin meningkatkan minat pegawai untuk menjadi statistisi/pranata komputer.

Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga

Indikator "Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga" memiliki capaian sebesar 100 persen. Meskipun targetnya terpenuhi, kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dengan capaian sebesar 120 persen. Target yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2019 adalah sebesar 39 persen dan dapat direalisasikan sebesar 39 persen. Peningkatan jumlah fungsional statistisi/pranata komputer di Kementerian/Lembaga sebagai hasil dari Permen PAN & RB tentang *inpassing* (pengangkatan pada jabatan fungsional) sehingga banyak pegawai yang tertarik menjadi pejabat fungsional.

SS4.2.: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS. Namun pada pelaksanaannya selama lima tahun, implementasi SAKIP yang telah dilakukan BPS masih belum cukup menghasilkan nilai yang ditargetkan yakni peningkatan hasil penilaian oleh Kemen PAN & RB relatif sangat kecil. Solusinya, perlu terobosan langkah perbaikan yang menyeluruh terhadap semua aspek SAKIP BPS baik penyusunan IKU, IKI, program kerja, sistem *monitoring*, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut yang terpadu dan efisien. Hal ini dapat tercapai jika terdapat sinergi semua unit kerja di BPS dalam pelaksanaan SAKIP.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Tahun 2019”

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	75,01*	96,17	96,17	0
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	79,00	77,51*	98,11	101,99	-3,88
Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	100,00	153,33	120,00	120,00	0
Rata rata Capaian Kinerja			104,76	106,05	-1,29

*angka sementara

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di level pusat maupun di daerah. Dari sisi pengukuran keberhasilan telah dilakukan reuiu IKU melalui Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perka BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang IKU BPS, yang kemudian diikuti dengan reuiu Renstra 2015-2019.

Pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 75,01 atas pelaksanaan SAKIP BPS, sama dibandingkan penilaian tahun 2018 sebesar 75,01. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar 78 poin atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 98,11 persen. Beberapa penyebab belum tercapainya target antara lain rumusan IKU BPS dinilai masih belum baik karena beberapa IKU tingkat lembaga BPS masih dijumpai indikator output, Komitmen pimpinan BPS belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya khususnya satuan kerja dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit masing-masing, penjenjangan kinerja dalam PK belum ditata dengan baik karena belum terlihat keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya.

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 77,51 atas pelaksanaan RB sama dibandingkan hasil penilaian tahun 2018 sebesar 77,51. Hasil penilaian lebih rendah dari target 2019

sebesar 79,00 poin atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 98,11 persen. Dengan belum dapat dipenuhinya target kinerja, maka ke depan BPS hendaknya lebih telaah memasang target lebih tinggi sehingga proses reformasi birokrasi di BPS dapat semakin lebih baik dan menyentuh semua jajaran BPS serta senantiasa berusaha memenuhi rekomendasi Kemen PAN & RB seperti berusaha membuat indikator kinerja individu berbasis kinerja unit kerja.

Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)

Pelaksanaan SAKIP di BPS bukan hanya dilaksanakan di tingkat pusat saja melainkan pada satuan kerja daerah (satker). Hasil penilaian Inspektorat BPS menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan SAKIP di daerah. Tercatat pada Tabel 10, realisasi persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik mengalami kenaikan yang tinggi dari 113,33 persen di tahun 2018 menjadi 153,33 persen pada Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP tahun 2018-2019, hasil penilaian evaluasi menggunakan Sistem *Field Evaluation* antara lain :

1. Satuan Kerja Setingkat Eselon II berasal dari BPS Provinsi, Pusdiklat dan Polstat STIS diperoleh hasil penilaian 32 (tiga puluh dua) BPS Provinsi dan Pusdiklat yang memperoleh Kategori "BB" dan 2 (dua) BPS Provinsi memperoleh Kategori "B".
2. Satuan Kerja Setingkat Eselon III yakni BPS Kabupaten/Kota terpilih sampel diperoleh hasil penilaian 1 (satu) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori "BB", 52 (lima puluh dua) BPS Kabupaten/Kota yang memperoleh Kategori "B".

SS4.3: Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

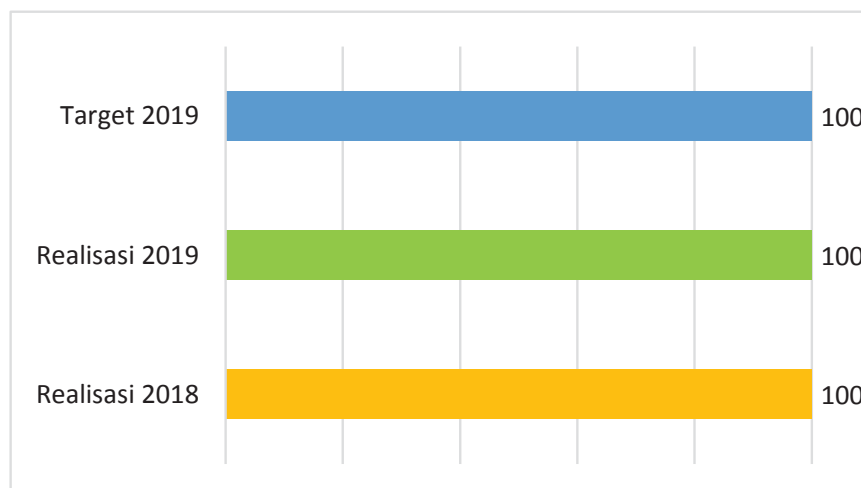
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini sama dengan indikator yang digunakan pada Tujuan 4. Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- Tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*) skor 25
- Tidak Wajar skor 50
- Wajar Dengan Pengecualian skor 75
- Wajar Tanpa Pengecualian skor 100

Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100).

Tahun 2019, BPS mendapatkan penilaian opini dari BPS "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan kata lain mendapatkan skor 100 untuk penghitungan kinerjanya sebagai konversi indikator kategorik. Artinya BPS dapat mempertahankan sekaligus memenuhi target.



Gambar 10. Target dan Realisasi Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK Tahun 2018-2019

SS4.4: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian IKU yang juga merupakan salah satu Indikator kinerja keberhasilan Program PSPA BPS.

Indikator "Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS" adalah indikator yang berasal dari sasaran "Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)" pada tujuan 2 (Perka IKU Nomor 2 Tahun 2016). Sesuai rekomendasi Kemenpan-RB pada penilaian AKIP Tahun 2016 maka indikator ini dimuat tersendiri yaitu pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS" yang merupakan sasaran baru pada Perka IKU Nomor 2 Tahun 2017.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 dengan masing-masing realisasi sebesar 98,99 persen dan 97,69 persen. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 98,99 persen.

Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS

Indikator "Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS" dan Indikator "Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diselesaikan" adalah indikator baru (reviu Perka Nomor 2

Tahun 2016) yang merupakan penajaman dari indikator-indikator sebelumnya sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kemenpan-RB pada penilaian AKIP Tahun 2016. Capaian indikator "Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS" pada tahun 2019 sebesar 111,11 persen dengan realisasi 100 persen dari target 90 persen. Upaya yang dilakukan untuk tetap memenuhi kepuasan pegawai diantaranya melakukan pemeliharaan maupun penambahan sarana dan prasarana pegawai. Selain itu juga senantiasa cepat merespon keluhan dari pegawai BPS.

Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diselesaikan

Capaian indikator "Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan" adalah sebesar 100 persen dengan target yang sama ditetapkan di tahun 2019. Capaian di tahun 2019 berada di atas capaian tahun 2018 yakni sebesar 88,28 persen. Hal ini berarti terdapat peningkatan dalam hal pengadaan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2 Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut. Terdapat perbedaan target antara yang tertera pada dokumen renstra dengan target dalam PK akibat adanya reviu

target PK. Hal ini dijelaskan dalam surat pernyataan di Lampiran.

Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

Berdasarkan Tabel 11, realisasi dari indikator tujuan 1 mencapai 98,33 persen, melampaui target tahun 2019 baik renstra maupun target PK yang sebesar 85,00 persen. Target kinerja pada tahun 2019 juga telah tercapai semenjak tahun 2015 dengan realisasi sebesar realisasi pada tahun 2015 yang sebesar 85,87 persen. Untuk itu perlu penajaman target agar pengukuran keberhasilan BPS terhadap tujuan satu lebih tergambar.

Tabel 11. Perbandingan Target Renstra dengan Target dan Realisasi PK serta Capaian Kinerja BPS Tahun 2019

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra 2019	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Terhadap Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	85,00	85,00	98,33	115,68
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	89,00	85,00	98,33	115,68
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90,00	90,00	92,82	103,13
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu	31	152	149	98,03
1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas				
Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	6	4	4	100,00

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra 2019	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	86,00	86,50	99,01	114,46
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	1.300.000	1.600.000	3.118.501	120,00
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	50,00	30,00	44,29	120,00
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80,00	86,00	98,86	114,95
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	800	500	4002	120,00
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	800	500	4002	120,00
Jumlah Instansi/ Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	115	10	19	120,00
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	28	10	19	120,00
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra 2019	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik				
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	70,00	70,00	70,00	100,00
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	70,00	67,00	68,00	101,49
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	30,00	39,00	39,00	100,00
4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	81,00	78,00	75,01	96,17
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	81,00	79,00	77,51	98,11
Persentase Satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	36	100,00	153,33	120,00
4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan				
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
4.4. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80,00	100,00	98,99	98,99
Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	100,00	90,00	100,00	111,11
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00

SS1.1.: Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Dari 3 (tiga) indikator pada sasaran "Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS" tercatat ada 2 (dua) indikator yang melampaui target 2019 yaitu indikator "Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik" (indikator pertama) dengan capaian 115,68 persen dan indikator "Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama" (indikator kedua) dengan capaian 103,13 persen. Di sisi lain, terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian dibawah 100 persen yaitu indikator ketiga "Jumlah *Release* data Statistik yang tepat waktu" dengan capaian 98,03 persen. Indikator ini perlu mendapat perhatian dan upaya lebih besar agar kinerja indikator tersebut semakin meningkat. Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra 2019, ketiga indikator seluruhnya telah mencapai realisasi yang melebihi target.

SS1.2.: Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas

Sasaran "Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas" hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu "Jumlah aktivitas statistik mendeklarasikan penjaminan kualitas". Capaian target indikator ini bila dibandingkan dengan target tahun 2019 adalah sebesar 100 persen. Target tercapai dengan merealisasikan sejumlah empat aktivitas. Sedangkan jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2019, realisasi tersebut masih berada di bawah target sebesar 6 aktivitas. Perubahan target menyesuaikan realita jumlah aktivitas yang mendeklarasikan penjaminan kualitas di BPS.

Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Beberapa indikator yang diukur realisasinya melalui indikator SKD, realisasinya jauh lebih besar dari target. Demikian juga pada indikator yang mewakili tujuan kedua, sebagaimana tercatat pada Tabel 11 capaiannya 114,46 persen dengan realisasi sebesar 99,01 persen. Angka tersebut jauh dari target tahun 2019 yang sebesar 86,50 persen maupun target renstra 2019 sebesar 86 persen. Untuk itu perlu penggalan lebih dalam lagi khususnya dalam penentuan target agar pengukuran keberhasilan tujuan ini menjadi lebih baik.

SS2.1.: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Pada sasaran ini seluruh indikator memiliki realisasi yang melebihi target PK maupun renstra tahun 2019 yaitu indikator "Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*" (indikator pertama) dengan capaian 120 persen, "Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional" (indikator kedua) dengan capaian 120 persen, dan indikator "Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS" (indikator ketiga) dengan capaian 114,95 persen. Bahkan indikator pertama dan kedua memiliki realisasi yang jauh melebihi target. Agar pengukuran keberhasilan BPS dalam mewujudkan sasaran "Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)" menjadi lebih baik, perlu dilakukan penajaman target pada ketiga indikator tersebut. Terjadi peningkatan target dari target renstra kecuali pada indikator kedua sehingga realisasi di tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan target renstra.

Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Tujuan 3 diwakili oleh indikator “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun”. Seperti telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, realisasi jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun (4.002) jauh melebihi target PK (500) maupun renstra (800) tahun 2019 sebagai dampak diperluasnya cakupan pengumpulan metadata hingga level kabupaten/kota. Untuk itu perlu dilakukan penajaman target, sehingga capaian kinerja yang diperoleh indikator tersebut dapat menggambarkan kinerja BPS.

SS3.1.: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran ini keberhasilannya diukur melalui 3 indikator, indikator pertama yaitu “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun” merupakan indikator yang mewakili tujuan ketiga. Indikator kedua yaitu “Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” dan indikator ketiga yaitu “Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi” realisasinya jauh dari target yang ditetapkan pada PK namun lebih rendah dari target renstra sebesar 115 dan 28.

Perubahan target tersebut menyesuaikan dengan keadaan bahwa meskipun sudah banyak Kementerian/Lembaga yang sadar/mau untuk mengajukan rekomendasi ke BPS sebelum mereka melakukan kegiatan survei, namun target yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlampau tinggi.

Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel

WTP akan selalu menjadi target BPS dalam pencapaian akuntabilitas keuangan, hal tersebut tercatat pada Renstra BPS 2015-2019. Tahun 2019 BPS mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini telah sesuai dengan target renstra.

SS4.1.: Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator "Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi" (indikator pertama), "Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer" (indikator kedua) dan "Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga" (indikator ketiga). Dari ketiga indikator yang ada pada sasaran ini, seluruhnya terealisasi melampaui target PK capaian masing-masing sebesar 100 persen, 101,49 persen dan 100 persen. Jika dibandingkan dengan target renstra, indikator kedua memiliki target yang lebih tinggi (70 persen) sehingga realisasi di tahun 2019 lebih rendah.

SS4.2.: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Jika dibandingkan dengan target PK maupun renstra tahun 2019, dari 3 (tiga) indikator pada sasaran ini hanya ada 1 (satu) indikator yang capaiannya melampaui target, yaitu "Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)" dengan capaian sebesar 120 persen. Sedangkan "Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB" capaian 96,17 persen dan untuk

indikator “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB” capaiannya 98,11 persen sehingga perlu upaya lebih keras agar hasil Penilaian SAKIP BPS terus meningkat sesuai dengan apa yang ditargetkan. Yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah disarankan Kemenpan & RB.

SS4.3.: Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Sasaran ini keberhasilannya diukur oleh satu indikator yang juga merupakan indikator dari tujuan keempat. Pencapaian indikator ini telah dijelaskan pada penjelasan indikator tujuan keempat.

SS4.4.: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Sasaran ini keberhasilannya diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS”, indikator “Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS” dan indikator “Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan”. Dari ketiga indikator pada sasaran ini, terdapat dua indikator yang mencapai target yaitu indikator kedua dan ketiga dengan capaian masing-masing sebesar 111,11 persen dan 100 persen. Sementara itu, indikator pertama yaitu “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS” tidak mencapai target sebesar 98,99 persen. Sementara itu jika dibandingkan dengan target renstra, ketiga indikator seluruhnya telah memenuhi target.

3.3 Capaian Kinerja BPS terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2019

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2018 dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Sasaran prioritas RKP 2019 terbagi atas 5 (lima) prioritas nasional. Lima prioritas nasional tersebut adalah : (1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

BPS berperan dalam mendukung 3 (tiga) prioritas nasional melalui dukungan ketersediaan data untuk program prioritas ke-2, ke-3 dan ke-4. Aktivitas yang mendukung prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:

- A. Program Prioritas Nasional Ke-2 “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa” melalui aktivitas :
 - 1. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa
 - 2. Penyusunan Inter Regional Input Output (IRIO)

- B. Program Prioritas Nasional Ke-3 “Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya”, melalui aktivitas :
 - 1. Survei Wisatawan Nusantara
 - 2. *Passenger Exit Survey* (PES)
 - 3. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional

4. Pendataan Statistik *E-Commerce*
 5. Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha
- C. Program Prioritas Nasional Ke-4 “Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan”, melalui aktivitas :
1. Survei Pertanian Tanaman Pangan/ Ubinan
 2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA

Penjelasan dan capaian kinerja aktivitas pendukung program prioritas nasional sebagai berikut:

A. Program Prioritas Nasional : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESA

1. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

Pendataan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi agregat terkait potensi infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menurut provinsi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengarahkan penelitian lebih jauh terkait pembangunan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam pendataan ini adalah: 1) Mengetahui seberapa besar perbedaan tingkat kesulitan geografis antar desa Tahun 2019; 2) Menghitung keterbukaan wilayah setiap desa dengan mengidentifikasi kondisi geografis desa, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi; 3) Mengetahui perkembangan suatu desa.

Tidak ada kendala yang berarti dalam aktivitas ini. Output aktivitas ini adalah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa dengan capaian 97,91 persen.

2. Penyusunan Inter Regional Input Output (IRIO)

Pembangunan ekonomi di Indonesia perlu didukung oleh potensi demografi, kekayaan sumberdaya alam serta keunggulan geografisnya. Pemerintah terus mengembangkan industri berbasis nilai tambah, salah satunya dengan melakukan penghiliran produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan, mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Akan tetapi, tidak semua produk tersebut sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi.

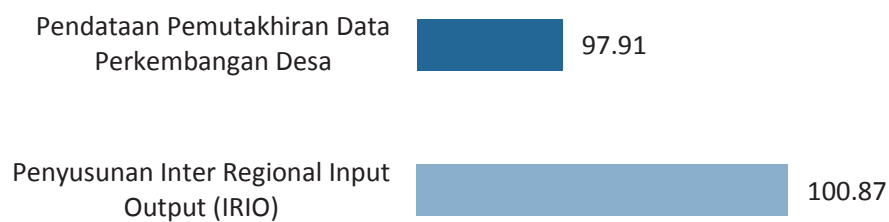
Dalam rangka memberikan gambaran ekonomi regional untuk mengetahui keterkaitan hulu dan-hilir inter-regional tersebut dan mengidentifikasi kekuatan produk yang dapat mendukung aliran produksi global maka diperlukan suatu alat analisis yang dapat menggambarkan secara komprehensif aliran produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yaitu IRIO yang merupakan pengembangan dari model Input-Output (I-O) *single region*.

Tahun 2019 kegiatan difokuskan pada koordinasi teknis, penyusunan klasifikasi, FGD pembahasan metodologi dan survei khusus input output (SKIO), pelatihan innas maupun petugas, pengumpulan dan pengolahan data survei dan penyusunan tabel I-O 34 provinsi putaran 0.

Kendala dalam aktivitas ini antara lain keterbatasan dalam 1) ketersediaan, kelengkapan dan keakuratan data pendukung penyusunan IRIO menurut provinsi maupun komoditas; 2) keterampilan/keahlian tenaga (SDM) penyusun IRIO/SUT/IO provinsi mengingat kegiatan ini baru dilaksanakan pertama kali; 3) TIK dalam mendukung proses pengolahan; 4) serta koordinasi mengenai isu konektivitas antar wilayah dan isu terkini lainnya (seperti: ekonomi digital).

Output aktivitas ini adalah Publikasi/Laporan Inter Regional Input Output dengan capaian 100,87 persen.

Rata-rata capaian kinerja untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung prioritas nasional “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa” sebesar 99,39 persen.



Gambar 11. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Tahun 2019

B. Program Prioritas Nasional : PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA

1. Survei Wisatawan Nusantara

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun wisnus tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kemampuannya menggerakkan perekonomian negara. Wisnus mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Maksud dilaksanakannya survei wisatawan nusantara adalah:

- Memperoleh data jumlah perjalanan wisnus, baik dari provinsi/kabupaten asal, maupun provinsi/kabupaten tujuan.
- Profil Wisnus yang meliputi Profil Demografi (Umur, jenis kelamin, pekerjaan, dsb), Pola perjalanan (Lama tinggal, akomodasi, moda transportasi, dsb), dan Pola perjalanan (Akomodasi, makan/minum, transportasi, dsb).

Kinerja aktivitas Survei Wisatawan Nusantara sebesar 94,10 persen.

2. *Passenger Exit Survey (PES)*

Pariwisata telah menjadi sektor yang tumbuh sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan kepariwisataan di Indonesia adalah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman). Data jumlah kedatangan wisman berasal dari laporan lalu lintas orang baik WNA maupun WNI dari kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Untuk melengkapi ketersediaan data wisman maka dilaksanakan survei *Passenger Exit Survey (PES)*. Kegiatan ini untuk memperoleh data rata-rata pengeluaran per kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia. Selain itu, PES juga digunakan untuk memperoleh informasi lain dari wisman yang berkunjung ke Indonesia, seperti profil demografi wisman (jenis kelamin, umur, kebangsaan, dan pekerjaan utama) dan pola perjalanan wisman (maksud utama kunjungan, jenis akomodasi yang digunakan, dan moda transportasi).

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah revisi DIPA yang baru turun di pertengahan tahun menyebabkan pelaksanaan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa terlambat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan survei mundur dari jadwal yang direncanakan. Dalam pelaksanaan lapangan juga menghadapi kendala terutama terkait pengurusan ijin di Bandara atau pelabuhan lokasi survei.

Kinerja aktivitas *Passenger Exit Survey* (PES) sebesar 90,80 persen.

3. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)

Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama (*key driver*) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Untuk melihat keterkaitan antarsektor serta dampak ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata, dibutuhkan data yang akurat, terpercaya, terkini, dan konsisten yang meliputi semua aspek yang terkait dengan pariwisata.

Nesparnas merupakan suatu bagian perangkat statistik dimana sistem neraca yang dibangun berdasarkan pengembangan dan turunan dari sistem neraca nasional yang bersifat lebih khusus atau kompleks. Baik metode, penghitungan dan analisa yang dilakukan merupakan adopsi dari sistem neraca nasional. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan data pariwisata sebagai salah satu leading sektor dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan untuk mengetahui kontribusi, kemampuan serta daya saing pariwisata dalam perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan lapangan juga menghadapi kendala belum lengkapnya semua data yang diperlukan data investasi pariwisata dan Tabel IO pariwisata. Kinerja aktivitas Nesparnas sebesar 100 persen.

4. Pendataan Statistik *E-Commerce*

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan *e-commerce*.

Fenomena *e-commerce* menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. Dalam rangka pemetaan *e-commerce* di Indonesia, BPS melakukan pendataan *e-commerce* berbasis perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha *e-commerce* di Indonesia, dari sudut pandang pelaku usaha/pengguna jasa *e-commerce*.

Dalam pelaksanaannya aktivitas ini juga menghadapi kendala tidak tersedianya *frame* usaha *e-commerce*, sehingga menyulitkan dalam pengambilan sampel dan estimasi. Kinerja aktivitas pendataan statistik *e-commerce* sebesar 97,22 persen.

5. Penyusunan Disagregasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) PMTB Institusi dan Lapangan Usaha

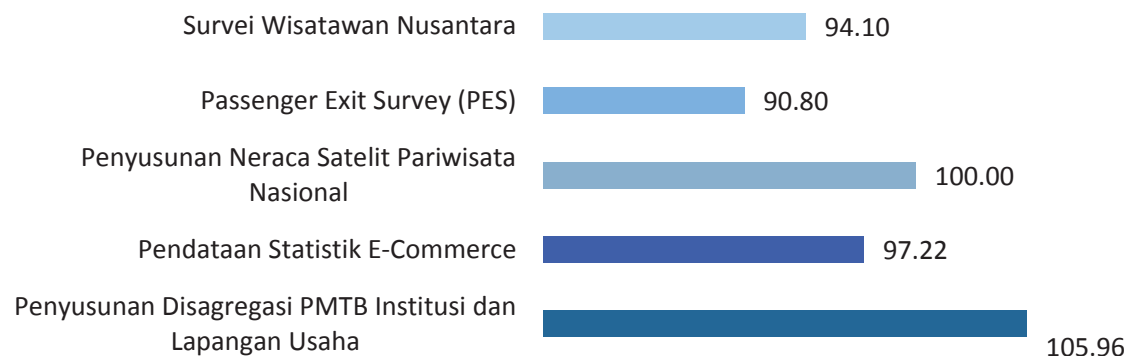
Barang modal atau kapital merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.

Kapital diperoleh karena adanya kegiatan investasi, dalam hal ini biasanya lebih dikenal dengan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB). Posisi PMTB atau barang modal merupakan indikator kapasitas produksi dari suatu negara yang menggambarkan nilai barang modal pada keadaan satu saat yang terjadi karena adanya proses akumulasi penambahan dan pengurangan barang modal. (PMTB) merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang, institusi, dan lapangan usaha berdasarkan konsep SNA 2008. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kesalahan pengisian nominal dan satuan oleh petugas, ketidaktersediaan data di dinas, serta perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan. Kinerja aktivitas Penyusunan Disagregasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) PMTB Institusi dan Sektoral sebesar 105,96 persen.

Rata-rata capaian kinerja untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung prioritas nasional "Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya" sebesar 97,62 persen.



Gambar 12. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya Tahun 2019

C. Program Prioritas Nasional : KETAHANAN PANGAN

1. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

Maksud dan tujuan survei ini yaitu untuk mendapatkan data luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan; luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah; banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan); dan keterangan tentang perbenihan dari laporan Dinas Pertanian, serta data produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan dari Survei Ubinan.

Output survei ini adalah Laporan Luas Lahan Menurut Penggunaan 2018, Produksi Padi 2018, dan Produksi Palawija 2018 yang tidak dirilis untuk khalayak umum dan diperuntukkan hanya untuk kalangan internal BPS karena masih dilakukan upaya penyempurnaan data Statistik Tanaman Pangan.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah metode pengumpulan data yang masih perlu dikembangkan agar kualitas data produksi tanaman pangan menjadi lebih baik, serta alat ubinan yang jumlahnya terbatas.

Kinerja aktivitas Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan sebesar 99,34 persen.

2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Data luas panen padi yang diperoleh BPS dari laporan Statistik Pertanian (SP) Padi masih memiliki kelemahan dalam akurasi yang rendah dan waktu pengumpulan data yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik

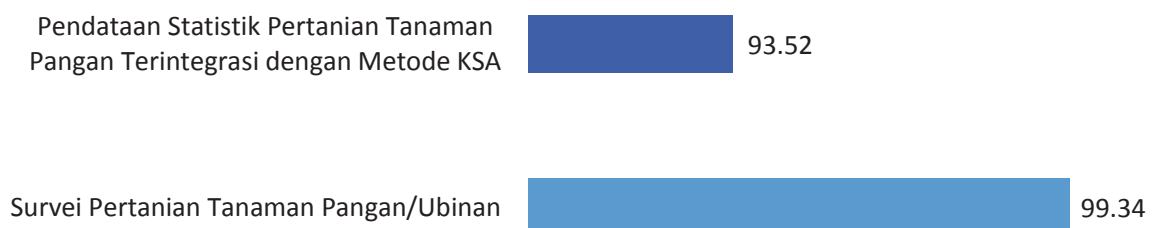


pertanian yang berbasis teknologi dalam rangka menyempurnakan metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen.

Maksud dan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang konvensional menjadi lebih obyektif, ilmiah, dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2019. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah lokasi sampel di beberapa wilayah yang sulit diakses dan belum tersedianya asuransi untuk petugas.

Kinerja aktivitas Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) sebesar 93,52 persen.

Rata-rata capaian kinerja untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung prioritas nasional "Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan" sebesar 96,43 persen.



Gambar 13. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Tahun 2019

3.4 Prestasi Tahun 2015-2019

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja BPS sejak tahun 2015-2019. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga atas kinerja BPS yang dianggap baik. Seiring berjalan tahun, prestasi yang BPS raih semakin baik dan menunjukkan peningkatan. Prestasi-prestasi tersebut antara lain:

Prestasi tahun 2015:

1. Juara pertama tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dari Pemingkat e-Government Indonesia (PeGI), Ditjen.
2. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional untuk kategori taat pelaporan.
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk keempat kalinya sejak tahun 2011.
4. Juara II dalam kategori hemat energi dan air pemerintah pusat oleh Kementerian ESDM.

Prestasi tahun 2016:

1. BPS mendapatkan sertifikasi akurat dari International Monetary Fund (IMF) untuk data Neraca Nasional.
2. BPS menerima penghargaan sebagai lembaga dengan skor tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Layanan Publik tahun 2016 oleh Ombudsman RI.
3. BPS menerima penghargaan TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi dengan judul Wajah Baru Website BPS se Indonesia: Easy to Manage, Multi Devices, Dynamic Table, dan Multi View". Penghargaan ini diberikan oleh KemenPAN dan RB.
4. BPS menerima penghargaan Terbaik III untuk Kategori Pelayanan Informasi melalui Internet yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) berada di bawah naungan Kemkominfo.

Prestasi tahun 2017:

1. BPS mendapat penghargaan sebagai satker terbaik (peringkat 2) pada Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Katergori K/L Pagu Sedang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
2. Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi B dalam Program dan Pelatihan dengan Akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
3. BPS berhasil mempertahankan lembaga dengan skor tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Layanan Publik tahun 2016 oleh Ombudsman RI.

Prestasi tahun 2018:

1. BPS berhasil mengakhiri polemik data produksi beras melalui Kerangka Sampel Area (KSA)

Persoalan data produksi beras kerap menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kementerian terkait. Polemik data produksi beras yang terjadi sejak 1997 salah satunya dikarenakan perhitungan luas panen khususnya padi yang menggunakan metode eye estimate yang dianggap kurang ilmiah. Akurasi data luas panen menggunakan metode eye estimate belum terukur, data luas panen disinyalir kurang objektif dan data luas panen disinyalir overestimate.

BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan perbaikan metode pengumpulan data dengan menerapkan KSA yang merupakan

salah satu pendekatan statistik spasial yang dikembangkan oleh FAO (Food Agricultural Organisation), USDA (United State Department of Agriculture), dan EUROSTAT Uni Eropa.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla bersama Kepala BPS, juga beberapa menteri dan kepala lembaga menyampaikan hasil perbaikan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) di depan awak media di Kantor Wapres. Setelah dirilis oleh Wapres, data produksi beras digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan di sektor pangan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa data beras BPS sebagai acuan sekaligus mengakhiri polemik perbedaan data produksi beras.

2. Pada 3 Maret 2018 dalam kegiatan Open Data Inventory (ODIN) 2017, ODW mengumumkan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat ke 27 dari 180 negara di dunia dan peringkat ke 2 se-ASEAN.

Prestasi tahun 2019:

1. BPS berprestasi dengan RADAR PADI.

Di tahun 2019, metode inovasi Kerangka Sampel Area (KSA) yang sebelumnya telah diterapkan BPS diikuti dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan menggunakan nama Raih Data Akurat Padi (RADAR PADI). Inovasi tersebut berhasil menjadi salah satu inovasi BPS yang diakui nasional bahkan mendapatkan peringkat TOP 45.

2. Pusdiklat BPS mendapatkan peringkat pertama dalam penghargaan Lembaga Adimistrasi Negara (LAN) Awards Tahun 2019 serta Penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 : *Learning Center for The Fourth*

Industrial Revolution Kategori Lembaga Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.

3. BPS meraih Penghargaan OpenGov atas inovasinya berupa Aplikasi Wilkerstat yang digunakan pada kegiatan perbaikan peta wilayah awal tahun 2019 silam dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2020.
4. BPS meraih peringkat ke-2 dalam penghargaan oleh Kementerian Keuangan untuk kategori Kualitas Pelaporan BMN untuk kelompok K/L (dengan jumlah satuan kerja lebih dari seratus di bawah Kementerian Keuangan).
5. BPS meraih predikat BAIK dalam hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dan Penghargaan Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB.
6. BPS meraih peringkat ke-XIII "Memuaskan" kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Pembangunan Sistem *Back Office* (BO) sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan mulai dari anggaran dan permintaan belanja (SIMPRO), SIMKEU, penghitungan dan realisasi keuangan serta absensi
8. Polstat STIS mendapatkan peringkat ke-1 dan ke-2 dalam Kompetisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Datathon Tahun 2019.
9. Banyak satker BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan dari instansi lain. Penghargaan satker BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

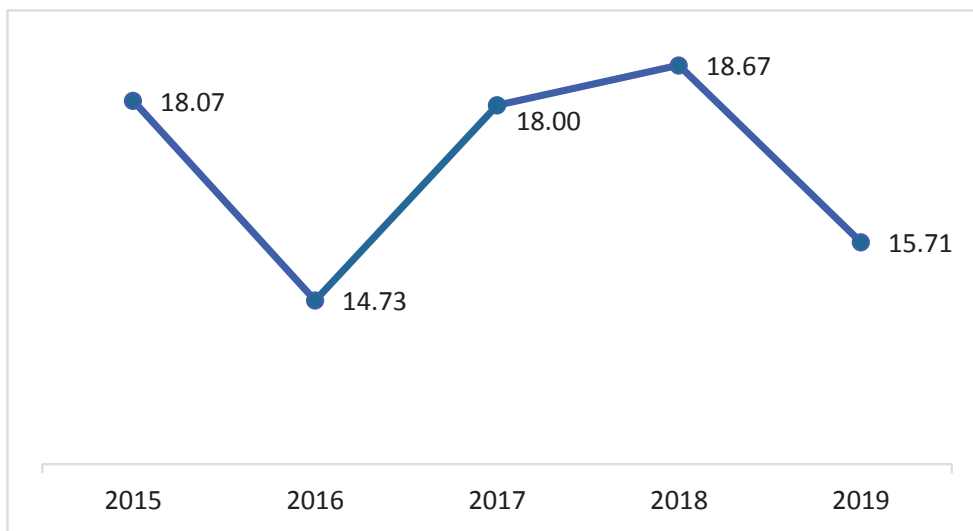
3.5 Upaya Efisiensi BPS

Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Beberapa upaya efisiensi yang dilakukan BPS adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, BPS merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran. Perkembangan nilai efisiensi dari tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 14. Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2015-2019



Perkembangan nilai efisiensi cenderung bergerak fluktuatif. Semakin besar nilai efisiensi berarti instansi mampu memaksimalkan capaian kinerjanya dengan merealisasikan anggaran seefisien mungkin.

Efisiensi terendah berada di tahun 2016 yang kemudian meningkat hingga di titik puncak di tahun 2018 dan kembali menurun di tahun 2019 ke angka 15,71. Penurunan ini berarti BPS tetap mampu meningkatkan capaian kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2018 namun dengan realisasi anggaran yang jauh lebih tinggi.

Adapun di tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 4.977,39 miliar atau 94,86 persen dari pagu sebesar Rp 5.247,07 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran yang masing masing sebesar 112,54 persen dan 103,06 persen, dapat dikatakan BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi juga terlihat pada pelaksanaan hampir seluruh program dan seluruh sasaran. Tiga dari empat program memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2019

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
DMPTTL	99,79	96,16
PSPA	94,50	98,05
PPAA	106,96	97,30
PPIS	107,77	92,76
TOTAL		94,86

Upaya efisiensi juga dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja per sasaran dengan realisasi anggaran seperti yang tertera pada Tabel 13. Terlihat bahwa seluruh capaian kinerja sasaran berada di atas realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu mewujudkan capaian kinerja yang cukup baik dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2019

Sasaran (1)	Capaian Kinerja (%) (2)	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Realisasi Anggaran (%) (3)
01-Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	105,61	1.414,49	1.283,84	90,76
02-Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	100,00	626,66	616,55	96,45
03-Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	118,32	83,46	70,36	84,30
04-Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	120,00	26,47	24,26	91,65
05-Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	100,50	134,55	125,47	93,25
06-Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	104,76	83,97	72,74	86,64
07-Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	100,00	2.632,67	2.544,14	96,64
08-Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	103,37	244,80	240,03	98,05

2. Di tahun 2018, berdasarkan Peraturan Presiden RI No 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik maka tunjangan kinerja pegawai BPS mengalami kenaikan. Total kebutuhan biaya atas kenaikan tersebut sekitar Rp. 203,35 Milyar yang dibebankan pada alokasi biaya dalam DIPA BPS yang sudah ada dan telah dilakukan penyesuaian anggaran baik pada tahun 2018 maupun 2019. Untuk keperluan tersebut maka BPS melakukan berbagai efisiensi diantaranya Sekretaris Utama BPS telah mengeluarkan surat rencana efisiensi anggaran ke semua satker BPS. Beberapa hal yang dilakukan adalah integrasi beberapa pelatihan petugas survei untuk menghindari pemanggilan petugas secara berulang dalam waktu berdekatan, pelaksanaan konsinyering, pengadaan bahan komputer dan ATK, sisa hasil lelang dll. Dengan dilakukan efisiensi tersebut maka BPS telah menghemat keuangan negara untuk memenuhi kenaikan tunjangan kinerja pegawai BPS tanpa membebankan kepada Kemenkeu.

3. Penghematan sumber daya energi terus dilakukan BPS diantaranya dengan upaya menghemat penggunaan air dan listrik dalam aktivitas perkantoran serta memasang himbauan-himbauan agar pegawai senantiasa turut serta menghemat sumber daya energi khususnya apabila sudah tidak digunakan. Upaya ini diapresiasi oleh Kementerian ESDM dimana sejak tahun 2015 BPS menorehkan prestasi dalam kategori hemat energi dan air.

3.6. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2015 hingga 2019, anggaran yang telah ditetapkan dalam pagu sebagian besar terrealisasi dalam kisaran angka 90 persen, kecuali pada tahun 2015 yang hanya mencapai 87,87 persen.

Jika dilihat perkembangannya, realisasi anggaran BPS cenderung menunjukkan tren meningkat. Tahun 2015 menunjukkan realisasi terendah kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 91,18 persen. Namun di tahun 2017 terdapat sedikit penurunan angka realisasi menjadi 90,85 persen. Selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai realisasi tertinggi sebesar 94,86 persen.

Tahun	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(3)
2015	87,87
2016	91,18
2017	90,85
2018	91,15
2019	94,86

Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 4.977,39 miliar dengan rincian belanja operasional (Belanja pegawai dan Belanja barang operasional) sebesar Rp 2.563,89 miliar (97,74 persen dari pagu) dan belanja nonoperasional sebesar 2.413,50 miliar (91,98 persen dari pagu). Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran BPS pada tahun 2019 mencapai 94,86 persen.

Tabel 15. Realisasi Pagu BPS menurut jenis Belanja TA 2019 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Operasional	2.623,05	2.563,89	97,74
Non Operasional	2.624,02	2.413,50	91,98
Total	5.247,07	4.977,39	94,86

Jika dirinci menurut sumber dana perbandingan antara realisasi dengan pagu, persentase realisasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) adalah yang terbesar yaitu 94,93 persen. Selanjutnya berturut-turut adalah Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) sebesar 94,68 persen, Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) sebesar 93,28 persen, dan yang paling rendah realisasinya adalah Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar 86,47 persen.

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran BPS berasal program DMPTTL dengan realisasi sebesar Rp 2.738,76 miliar kontribusinya mencapai 55,02 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp 1.990,22 miliar kontribusinya terhadap total realisasi anggaran BPS sebesar 39,99 persen. Adapun untuk Program PSPA dan PPAA masing-masing kontribusinya sebesar 5,18 persen dan 0,30 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2019 (Milyar Rupiah)

Program/ Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)	Kontribusi terhadap Realisasi Total
(1)	(2)	(3)	(4)	
01 DMPTTL	2.848,094	2.738,755	96,16	55,02
02 PSPA	244,798	240,033	98,05	4,82
03 PPAA	8,620	8,387	97,30	0,17
06 PPIS	2.145,560	1.990,216	92,76	39,99
Total	5.247,072	4.977,39	94,86	100,00

Serapan paling rendah terdapat pada program PPIS sebesar 92,76 persen. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan di program ini telah melakukan efisiensi anggaran, meskipun serapan anggaran rendah namun capaian kegiatan maupun output telah mencapai 100 persen.





04

BAB IV

PENUTUP

Kerja BPS pada tahun 2019 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja tujuan sebesar 112,54 persen dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 103,06 lebih baik dibandingkan capaian kinerja tahun 2018. Dari sisi pengguna data, hasil SKD menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi pada kualitas dan layanan data BPS (capaian 99,01 persen). Berbagai penghargaan yang diterima, menjadi salah satu bukti tercapainya tujuan BPS.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian pada tahun depan juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain:

Penajaman IKU

Agar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran BPS menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya. Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan:

1. Sistem Statistik Nasional (SSN): Perlu penambahan indikator dalam rangka mengukur keberhasilan SSN. Bukan hanya indikator "Jumlah metadata statistik sektoral dan khusus yang dihimpun", indikator "Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer" dan indikator "Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi", melainkan juga indikator jumlah instansi yang telah mendapatkan sosialisasi kegiatan statistik.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): BPS sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, kinerja BPS dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut di seluruh instansi pemerintah juga harus terukur yaitu dengan menambahkan indikator terkait pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di instansi lain.

Penajaman dan Revisi Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator terutama yang pengukurannya diperoleh dari hasil SKD, realisasinya jauh melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja BPS terus meningkat dan belum adanya rencana untuk menggantikan SKD dalam mengukur indikator dimaksud, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) target kinerja. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.

Selain penajaman target perlu juga dilakukan revisi target karena ada beberapa indikator yang targetnya terlalu tinggi sehingga BPS belum siap untuk mencapai target yang ditetapkan pada Renstra tersebut.



Lampiran

Lampiran 1.

Renstra BPS 2015 – 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik						
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	85%	85%	89%
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	80%	90%	90%	90%
	1.3. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27	28	31	31	31
	SS.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas					
	2.1. Jumlah Aktivitas Statistik mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	5	7	2	11	6
	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	3.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		42 %	44%	46 %	50 %
	3.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80%	80%	80%	80%	80%
	SS.4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN					
	4.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	500	500->800	500	800
	4.2. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik			115	115	115
	4.3. Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi			28	28	28
	SS.5. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik					
	5.1.Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu			70	72	70
	5.2.Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer			70	72	70
	5.3.Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga			30	32	30



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SS.6. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
	6.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75	75	78	81	81
	6.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	65	70	75	77	81
	6.3. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)			80	90	36
	SS.7. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan					
	7.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	SS.8. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS					
	8.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS			80	90	80
	8.2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS			100	100	100
	8.3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan			100	100	100

Lampiran 2.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Suhariyanto
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Maret 2019
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PUSAT STATISTIK

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik melalui Kerangka Penjaminan Kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90
	Jumlah <i>release</i> data statistik yang tepat waktu	Data	152
Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas	Aktivitas	4
Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik	Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	86,50
Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (<i>User Engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	1.600.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	30
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	86
Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	500
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	500
	Jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	10
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti	Instansi	10

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	rekomendasi		
Tujuan 4. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya Kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70
	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	67
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	39
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN - RB	Point	78
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN - RB	Point	79
	Persentase satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari satker yang diperiksa)	Persen	100
Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	100
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	90
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100



Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 464.820.802.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 39.753.175.000,-
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 8.619.710.000,-
4. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 666.085.470.000,-
Jumlah	Rp. 1.179.279.157.000,-

Jakarta, 23 Maret 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001

Lampiran 3.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	85,00	98,33	115,68
SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	85,00	98,33	115,68
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	Tw I	0	0	0	
			Tw II	0	0	0	
			Tw III	0	0	0	
	Jumlah Release data Statistik	Aktivitas	Tw I	35	35	23,03	
			Tw II	73	72	47,37	
			Tw III	109	108	71,05	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang tepat waktu		Tw IV	152	149	98,03
SS2	Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	Aktivitas	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	4	4	100
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	86,50	99,01	114,46
SS3	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	Tw I	400.000	803.003	50,19
				Tw II	800.000	1.450.345	90,65
				Tw III	1.200.000	2.203.803	120,00
				Tw IV	1.600.000	3.118.501	120,00
		Persen	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	30	44,29	120,00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	86	98,86	114,95
T3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadana	Tw I	0	0	0
				Tw II	25	159	31,80
				Tw III	200	699	120,00
				Tw IV	500	4.002	120,00
SS4	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggar -aan SSN	Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadana	Tw I	0	0	0
				Tw II	25	159	31,80
				Tw III	200	699	120,00
				Tw IV	500	4.002	120,00
		Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan	Instansi	Tw I	0	0	0
				Tw II	2	9	90



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		rekomendasi kegiatan statistik		Tw III	5	13	120,00		
				Tw IV	10	19	120,00		
		Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	Tw I	0	0	0		
				Tw II	2	9	90		
				Tw III	5	13	120,00		
				Tw IV	10	19	120,00		
		T4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	Tw I	0	0	0
						Tw II	0	0	0
				Tw III	100	100	100,00		
				Tw IV	100	100	100,00		
SS5	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	Tw I	0	0	0		
				Tw II	0	0	0		
				Tw III	0	0	0		
				Tw IV	70	70	100,00		
		Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan	Persen	Tw I	64	65	97,01		
				Tw II	65	65	97,01		
				Tw III	66	68	101,49		
				Tw IV	67	68	101,49		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pranata komputer					
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Le mbaga	Persen	Tw I	27	26	66,67
				Tw II	28	30	76,92
				Tw III	29	30	76,92
				Tw IV	39	39	100,00
SS6	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	78	75,01	96,17
		Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	79	77,51	98,11
		Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	153,33	120,00
				Tw IV	100	153,33	120,00
SS7			Skor	Tw I	0	0	0



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thdap Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK		Tw II	0	0	0
				Tw III	100	100	100,00
				Tw IV	100	100	100,00
SS8	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	100	98,99	98,99
		Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	Tw I	25	25	27,78
				Tw II	50	50	55,56
				Tw III	75	75	83,33
				Tw IV	90	100	111,11
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	Tw I	25	25	25
				Tw II	50	50	50
				Tw III	75	75	75
				Tw IV	100	100	100,00

Lampiran 4.

Pernyataan Perubahan Target PK terhadap Renstra

SURAT PERNYATAAN

Memperhatikan kemampuan BPS dalam pencapaian target kinerja tahun 2019 dan hasil evaluasi tahun 2018, maka dengan ini kami menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara Target Kinerja 2019 dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Data target kinerja dalam perjanjian kinerja bersumber dari tiap Subject Matter yang bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja masing-masing.

Indikator (1)	Renstra 2019 (2)	PK 2019 (3)	Keterangan (4)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	89,00	85,00	Penyesuaian metodologi penghitungan dan adanya metode pencacahan baru SKD online
Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu	31	152	Satuannya dirubah dari jumlah aktivitas menjadi jumlah data atas rekomendasi KemenPAN-RB
Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	6	4	Penyesuaian target, karena masih terus membangun standar baku penjaminan kualitas
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	1.300.000	1.600.000	Penyesuaian target, karena jumlah pengunjung eksternal website BPS semakin banyak
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	50,00	30,00	Banyak konsumen data yang menggunakan data BPS dari pihak lain (mengutip) tetapi tidak mengetahui bahwa data tersebut adalah data dari BPS
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80,00	86,00	Penyesuaian target, karena BPS berupaya mempermudah akses data baik melalui website maupun Pusat Layanan Statistik Terpadu
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	800	500	Penyesuaian target yang lebih realistis
Jumlah Instansi/ Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	115	10	Penyesuaian target yang lebih realistis
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	28	10	Penyesuaian target yang lebih realistis
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	70,00	67,00	Penyesuaian target, karena masih perlu sosialisasi yang lebih masif tentang jabatan fungsional statistisi/pranata komputer di K/L lain
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	30,00	39,00	
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	81,00	78,00	Penyesuaian target, karena belum dapat melaksanakan sebagian rekomendasi Menpan & RB seperti perbaikan cascading indikator.
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB	81,00	79,00	Penyesuaian target, karena penilaian individu.. belum didasarkan pada kinerja organisasi serta pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
Persentase Satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	36	100,00	Penyesuaian target, karena pelatihan SAKIP sudah dilaksanakan di banyak satker di tahun 2019 serta ada perubahan ukuran.
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80,00	100,00	Penyesuaian target, karena beberapa sarana dan prasarana BPS telah dilakukan peningkatan
Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	100,00	90,00	Penyesuaian target, karena pemenuhan sarana dan prasarana belum semuanya dapat diakomodir anggaran.

Jakarta, 1 Februari 2019
KEPALA BIRO BINA PROGRAM



ATQO MARDIYANTO

Lampiran 5.

Pelaksanaan Press Release Tahun 2019

No	Tanggal	Tempat	Jam	Press Release
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2 Januari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (2) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (3) Indeks Harga Perdagangan Besar (4) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi
2	15 Januari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Upah Buruh (2) Profil Kemiskinan di Indonesia (3) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (4) Gini Ratio
3	1 Februari	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Indeks Harga Produsen (2) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (3) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (4) Indeks Harga Perdagangan Besar (5) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (6) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi
4	6 Februari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen (2) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto)
5	15 Februari	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis (2) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (3) Upah Buruh

No	Tanggal	Tempat	Jam	Press Release
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	1 Maret	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
7	15 Maret	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh
8	1 April	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
9	15 April	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Pembangunan Manusia (2) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (3) Upah Buruh
10	2 Mei	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Harga Produsen (2) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (3) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (4) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (5) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (6) Indeks Harga Perdagangan Besar
11	6 Mei	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen (2) Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia (3) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto)



No	Tanggal	Tempat	Jam	Press Release
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	15 Mei	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh
13	10 Juni	Gd.3 Lt.1	10.30 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
14	24 Juni	Gd.3 Lt.1	23.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh
15	1 Juli	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
16	15 Juli	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Gini Rasio (2) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (3) Upah Buruh (4) Profil Kemiskinan di Indonesia
17	29 Juli	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Demokrasi Indonesia
18	1 Agustus	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Indeks Harga Produsen (2) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (3) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (4) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (5) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (6) Indeks Harga Perdagangan Besar

No	Tanggal	Tempat	Jam	Press Release
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	5 Agustus	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) (2) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen
20	15 Agustus	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh
21	2 September	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
22	16 September	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (3) Upah Buruh
23	1 Oktober	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
24	15 Oktober	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Upah Buruh (2) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia
25	17 Oktober	Gd.3 Lt.1	11.30 WIB	(1) Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 1440H/2019M
26	1 November	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Indeks Harga Produsen (2) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (3) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur (4) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi



No	Tanggal	Tempat	Jam	Press Release
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(5) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (6) Indeks Harga Perdagangan Besar
27	5 November	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) (2) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen (3) Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia
28	15 November	Gd.3 Lt.1	09.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh
29	2 Desember	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi (2) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Gabah dan Beras (4) Indeks Harga Perdagangan Besar
30	16 Desember	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2) Upah Buruh

Lampiran 6.

Jumlah Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Jabatan Fungsional	Terampil					Ahli					Total
	Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Sub Total	Pertama	Muda	Madya	Utama	Sub Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Analisis Kepegawaian		2	3	2	7	14	16	2		32	39
Arsiparis		4	4		8						8
Auditor			2		2	14	31	7		52	54
Dokter							1	1		2	2
Dokter Gigi							2			2	2
Dosen *						15	42	10		67	67
Peneliti								3		3	3
Penerjemah							1			1	1
Penyuluh Hukum						10	3			13	13
Perawat							1			1	1
Perawat Gigi				1	1						1
Perencana						2				2	2
Pranata Humas				1	1	1	2			3	4
Pranata Komputer		11	14	1	26	60	73	4		137	163
Pustakawan			3		3	1	2			3	6
Statistisi	51	677	995	559	2.282	1.539	816	72	1	2.428	4.710
Widyaiswara						1	12	8	2	23	23
Jumlah	51	694	1.021	564	2.330	1.657	1.002	107	3	2.769	5.099

*) Nama Jabatan Dosen :

- Pertama : Asisten Ahli
- Muda : Lektor
- Madya : Lektor Kepala

Jumlah Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di
Kementerian/Lembaga/Instansi Tahun 2019

No	Nama Instansi	Fungsional	
		Pranata Komputer	Statistisi
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Badan Pusat Statistik	146	4.035
B	Kementerian/Lembaga/SKPD Non BPS	2.392	210
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	23	-
2.	Badan Informasi Geospasial	27	1
3.	Badan Kepegawaian Negara	106	2
4.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	40	4
5.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	14	1
6.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8	-
7.	Badan Pemeriksa Keuangan	10	-
8.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	82	-
9.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	55	-
10.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	7	-
11.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	5	-
12.	Badan SAR Nasional (Pencarian dan Pertolongan)	11	2
13.	Badan Siber dan Sandi Negara	6	-
14.	Badan Standardisasi Nasional	14	-
15.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22	-
16.	Kementerian Agama	142	32
17.	Kementerian Dalam Negeri	24	-
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6	-
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	50	3
20.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	92	-
21.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	1
22.	Kementerian Kesehatan	56	4
23.	Kementerian Ketenagakerjaan	43	-
24.	Kementerian Keuangan	360	-
25.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	41	1
26.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59	-

No	Nama Instansi	Fungsional	
		Pranata Komputer	Statistisi
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Kementerian Pariwisata	20	3
28.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	30	-
29.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	-
30.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	15	1
31.	Kementerian Perdagangan	41	12
32.	Kementerian Perhubungan	62	2
33.	Kementerian Perindustrian	17	1
34.	Kementerian Pertahanan	3	-
35.	Kementerian Pertanian	20	11
36.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	-
37.	Kementerian Sekretariat Negara	13	-
38.	Kementerian Sosial	58	1
39.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3	-
40.	Komisi Yudisial	6	-
41.	Lembaga Administrasi Negara	1	-
42.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	44	-
43.	Lembaga Ketahanan Nasional	6	-
44.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	52	-
45.	Lembaga Sandi Negara	6	-
46.	Mahkamah Agung	79	-
47.	Mahkamah Konstitusi	8	-
48.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14	-
49.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	7	-
50.	Sekretariat Jenderal DPP	2	-
51.	Sekretariat Jenderal DPR	20	-
52.	Pemerintah Daerah Tingkat I/II	547	127
JUMLAH		2.538	4.245

Lampiran 7.

Jumlah Pegawai BPS Tahun 2019

Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII ke bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	2	90	177	121	390
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	6	102	178	25	311
Deputi Bidang Statistik Sosial	4	75	98	10	187
Deputi Bidang Statistik Produksi	2	49	84	16	151
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	3	80	100	34	217
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	4	62	99	5	170
Inspektorat Utama	-	38	42	6	86
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	5	29	23	17	74
Politeknik Statistika STIS	16	61	16	11	104
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	1	36	329	172	538
BPS Provinsi Sumatera Utara	1	134	419	269	823
BPS Provinsi Sumatera Barat	3	62	261	132	458
BPS Provinsi Riau		49	208	128	385
BPS Provinsi Jambi		48	160	100	308
BPS Provinsi Sumatera Selatan		83	242	116	441
BPS Provinsi Bengkulu		44	179	44	267
BPS Provinsi Lampung		56	222	159	437
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		28	130	35	193
BPS Provinsi Kepulauan Riau		23	122	60	205

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi DKI Jakarta		52	91	74	217
BPS Provinsi Jawa Barat		132	457	401	990
BPS Provinsi Jawa Tengah		244	553	544	1.341
BPS Provinsi D I Yogyakarta	2	89	110	59	260
BPS Provinsi Jawa Timur	2	226	487	418	1.133
BPS Provinsi Banten		56	137	124	317
BPS Provinsi Bali	2	48	133	66	249
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	37	211	94	343
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		37	362	183	582
BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	46	257	105	402
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	2	33	255	67	357
BPS Provinsi Kalimantan Selatan		41	243	136	420
BPS Provinsi Kalimantan Timur	2	37	214	56	309
BPS Provinsi Kalimantan Utara		9	105	22	136
BPS Provinsi Sulawesi Utara	1	30	242	92	365
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		30	236	97	363
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	2	50	393	228	673
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		41	232	169	442
BPS Provinsi Gorontalo		17	154	46	217
BPS Provinsi Sulawesi Barat		32	112	67	211
BPS Provinsi Maluku		22	191	102	315
BPS Provinsi Maluku Utara		18	175	75	268
BPS Provinsi Papua Barat		19	215	53	287
BPS Provinsi Papua		26	350	120	496
Jumlah	63	2.521	9.004	4.858	16.446

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Jumlah Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2019

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	55	289	46		390
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	37	271	3		311
Deputi Bidang Statistik Sosial	45	141	1		187
Deputi Bidang Statistik Produksi	28	122	1		151
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	45	170	2		217
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	37	133			170
Inspektorat Utama	14	71	1		86
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23	48	3		74
Politeknik Statistika STIS	33	67	4		104
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	40	399	98	1	538
BPS Provinsi Sumatera Utara	82	618	120	3	823
BPS Provinsi Sumatera Barat	44	366	48		458
BPS Provinsi Riau	35	267	83		385
BPS Provinsi Jambi	37	234	37		308
BPS Provinsi Sumatera Selatan	41	331	69		441
BPS Provinsi Bengkulu	27	221	19		267
BPS Provinsi Lampung	45	317	75		437
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20	159	14		193
BPS Provinsi Kepulauan Riau	20	154	31		205
BPS Provinsi DKI Jakarta	40	154	23		217
BPS Provinsi Jawa Barat	104	750	132	4	990
BPS Provinsi Jawa Tengah	156	970	212	3	1.341
BPS Provinsi D I Yogyakarta	50	190	20		260
BPS Provinsi Jawa Timur	161	812	158	2	1.133
BPS Provinsi Banten	43	196	78		317

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Bali	27	182	37	3	249
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	33	250	60		343
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	35	425	115	7	582
BPS Provinsi Kalimantan Barat	43	332	32	2	409
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	24	300	33		357
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	29	334	57		420
BPS Provinsi Kalimantan Timur	35	256	18		309
BPS Provinsi Kalimantan Utara	12	115	9		136
BPS Provinsi Sulawesi Utara	23	287	54	1	365
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	27	273	63		363
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	56	480	135	2	673
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	22	351	69		442
BPS Provinsi Gorontalo	16	173	28		217
BPS Provinsi Sulawesi Barat	19	145	47		211
BPS Provinsi Maluku	20	214	81		315
BPS Provinsi Maluku Utara	17	187	64		268
BPS Provinsi Papua Barat	19	227	41		287
BPS Provinsi Papua	28	371	97		496
Jumlah	1.748	12.352	2.318	28	16.446

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselon di BPS Tahun 2019

SATUAN KERJA	JABATAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ES I	ES II	ES III	ES IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	1	5	19	50	75
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	1	3	12	34	50
Deputi Bidang Statistik Sosial	1	3	11	28	43
Deputi Bidang Statistik Produksi	1	3	10	28	42
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	1	3	11	33	48
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	1	3	12	32	48
Inspektorat Utama	1	3	1	3	8
Pusat Pendidikan dan Pelatihan		1	3	6	10
Politeknik Statistika STIS			2	5	7
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh		1	28	123	152
BPS Provinsi Sumatera Utara		1	37	202	240
BPS Provinsi Sumatera Barat		1	24	128	153
BPS Provinsi Riau		1	18	79	98
BPS Provinsi Jambi		1	17	77	95
BPS Provinsi Sumatera Selatan		1	21	108	130
BPS Provinsi Bengkulu		1	15	70	86
BPS Provinsi Lampung		1	20	102	123
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1	13	60	74
BPS Provinsi Kepulauan Riau		1	13	47	61
BPS Provinsi DKI Jakarta		1	11	56	68
BPS Provinsi Jawa Barat		1	32	176	209
BPS Provinsi Jawa Tengah		1	40	230	271
BPS Provinsi D I Yogyakarta		1	11	49	61
BPS Provinsi Jawa Timur			43	247	290
BPS Provinsi Banten		1	14	68	83

SATUAN KERJA	JABATAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ES I	ES II	ES III	ES IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Bali		1	15	74	90
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat		1	16	79	96
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		1	25	108	134
BPS Provinsi Kalimantan Barat		1	20	75	96
BPS Provinsi Kalimantan Tengah		1	20	70	91
BPS Provinsi Kalimantan Selatan		1	19	85	105
BPS Provinsi Kalimantan Timur		1	15	71	87
BPS Provinsi Kalimantan Utara		1	11	26	38
BPS Provinsi Sulawesi Utara		1	18	87	106
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		1	17	73	91
BPS Provinsi Sulawesi Selatan		1	30	160	191
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		1	19	86	106
BPS Provinsi Gorontalo		1	12	42	55
BPS Provinsi Sulawesi Barat		1	11	44	56
BPS Provinsi Maluku		1	16	75	92
BPS Provinsi Maluku Utara		1	15	43	59
BPS Provinsi Papua Barat		1	15	67	83
BPS Provinsi Papua		1	27	102	130
Jumlah	8	57	759	3.408	4.232

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Lampiran 8.

Pernyataan Telah Direviu

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2020

Inspektur Utama,


Drs. Akhmad Jaelani M.Si
NIP. 196306211986011001

Lampiran 9.

Prestasi yang diraih BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2019

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPS RI				
1		LAN Awards 2019 (Pusdiklat BPS)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	1
2		Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 (RADAR PADI)	Kementrian PAN-RB	-
3		Penghargaan OpenGov (Aplikasi Wilkertstat)	OpenGov	-
4		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	-
5		Predikat BAIK, Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018	Kementrian PAN-RB	-
6		Penghargaan Kategori Kualitas Pelaporan BMN untuk kelompok K/L (dengan jumlah satuan kerja lebih dari seratus di bawah Kementerian Keuangan)	Kementrian Keuangan	2
7		Kompetisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Datathon 2019 (Polstat STIS)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	1 dan 2
8		Penghargaan Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" tahun 2019	Kementrian PAN-RB	-

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		Penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 : Learning Center for The Fourth Industrial Revolution Kategori Lembaga Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS (Pusdiklat BPS)	Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI	2
10		Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Kepemimpinan TK IV dan Diklat Kepemimpinan Tk III (Pusdiklat BPS)	Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI	-
11		Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik Kategori LPNK dalam BKN Award	Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI	-
12		Penghargaan JDIHN Award sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN	Menteri Hukum dan HAM RI	-
13		Polstat STIS menyabet penghargaan di ajang National Statistics Challenge bidang Analisis Data	Universitas Brawijaya	1, 2, 3, Harapan 1, Harapan 2
14		Polstat STIS menyabet penghargaan di ajang National Statistics Challenge bidang Infografis	Universitas Brawijaya	3
Provinsi Aceh				
1	Provinsi Aceh	Koordinator Wilayah Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2019	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	1

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kabupaten Aceh Tenggara	Pengelolaan UP, Data Kontrak, Pengembalian SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekonsiliasi LPJ Bendahara, Perencanaan Kas, Penyerapan Anggaran, Pagu Minus dan Dispensasi Penyampaian SPM Satuan Kerja Periode Semester II Tahun 2019	KPPN Kutacane	3
3	Kabupaten Aceh Barat	Kategori Pagu Sedang untuk Realisasi Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2019	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh	3
4	Kabupaten Aceh Utara	Kategori Satuan Kerja Pagu Besar dengan Jumlah Pagu di Atas Rp 6M	Kepala KPPN Lhokseumawe	2
5	Kabupaten Aceh Utara	Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang dengan Jumlah Pagu di atas Rp. 2,4 M s.d Rp. 9 M	Kepala KPPN Lhokseumawe	2
6	Kabupaten Aceh Utara	Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang Dengan Jumlah Pagu di atas Rp. 2,4 M s.d Rp. 9 M	Kepala KPPN Lhokseumawe	3
7	Kabupaten Aceh Utara	Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang dengan jumlah pagu Rp. 2.4 s.d Rp. 6 M	Kepala KPPN Lhokseumawe	1
8	Kabupaten Aceh Tamiang	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Periode Semester 1 Tahun 2019 dengan Kategori Pagu sampai dengan 5 Milyar	KPPN Langsa	1
9	Kabupaten Nagan Raya	Nilai IKPA terbaik kategori pagu sedang	KPPN Meulaboh	3
10	Kota Langsa	IKPA Periode Semester 1 Tahun 2019	KPPN Langsa	2
11	Kota Langsa	IKPA Tertinggi Lingkup KPPN Langsa TA 2019	KPPN Langsa	1

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kota Langsa	Satker Inisiator pengguna KKP TA 2019	KPPN Langsa	-
Provinsi Sumatera Utara				
1	Provinsi Sumatera Utara	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Periode Tahunan 2018	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara	4
2	Provinsi Sumatera Utara	Satuan Kerja Ter-Proaktif dan Ter-komunikatif Tahun 2018	DJPb Kanwil Provinsi Sumatera Utara	-
3	Provinsi Sumatera Utara	Kinerja Sangat Baik Tahun 2018 Kategori Penatausahaan BMN (Korwil dengan Satuan Kerja Lebih Dari 15)	DJKN Kanwil Provinsi Sumatera Utara	1
4	Provinsi Sumatera Utara	Mitra Strategis Terbaik Kategori Instansi Vertikal	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara	-
5	Kabupaten Nias	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	KPPN Gunungsitoli	1
6	Kabupaten Mandailing Natal	Satuan Kerja Terbaik III Kategori IKPA	KPPN Padang Sidempuan	3
7	Kabupaten Tapanuli Selatan	Satker terbaik I Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	KPPN Padangsidempuan	1
8	Kabupaten Tapanuli Tengah	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker kategori pagu dipa 4 - 10 miliar rupiah lingkup KPPN Sibolga triwulan III Tahun 2019	KPPN Sibolga	2
9	Kabupaten Tapanuli Utara	Kinerja dan Kualitas Data Pada Kegiatan Statistik Pertanian	DR. Syech Suhaimi, SE, M.Si	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kabupaten Tapanuli Utara	Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik dengan Kinerja Terbaik	DR. Syech Suhaimi, SE, M.Si	2
11	Kabupaten Tapanuli Utara	Persembahan KSK	DR. Syech Suhaimi, SE, M.Si	1
12	Kabupaten Toba Samosir	IKPA Terbaik Tahun 2019	KPPN Balige	1
13	Kabupaten Toba Samosir	Pemanfaatan BMN Tahun 2018	KPKNL Pematang Siantar	1
14	Kabupaten Toba Samosir	Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)	Kanwil DJKN Sumatera Utara	1
15	Kabupaten Toba Samosir	Penyampaian LPJ Tercepat dan Akurat Setiap Bulan Tahun 2019	KPPN Balige	2
16	Kabupaten Asahan	Ketepatan waktu Pengajuan GUP Semester II Tahun 2019	KPPN Tanjung Balai	3
17	Kabupaten Simalungun	Treasury Performance Report Semester I Tahun 2019	KPPN Pematangsiantar	1
18	Kabupaten Simalungun	Akurasi Pengajuan SPM Tahun 2019	KPPN Pematangsiantar	1
19	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik II Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran dan Pengelolaan Rekening	KPPN Sidikalang	2
20	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik I Kategori Pagu Anggaran Kecil Semester II TA. 2018	KPPN Sidikalang	1
21	Kabupaten Dairi	Operator Terbaik Semester II TA. 2018	KPPN Sidikalang	1
22	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik Ke-1 Semester II TA. 2018 Kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan.jpeg	KPPN Sidikalang	1

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Kabupaten Dairi	Operator Terbaik Semester I TA. 2019	KPPN Sidikalang	1
24	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik I Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran dan Pengelolaan Rekening Semester I TA.2019	KPPN Sidikalang	1
25	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik I Kategori Pagu Anggaran Sedang Semester I TA. 2019	KPPN Sidikalang	1
26	Kabupaten Dairi	Satuan Kerja Terbaik Ke-1 Semester I TA. 2019 Kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan	KPPN Sidikalang	1
27	Kabupaten Dairi	Plakat Satuan Kerja Terbaik I Kategori Pagu Anggaran Kecil Semester II TA. 2018	KPPN Sidikalang	1
28	Kabupaten Serdang Bedagai	Penyampaian Laporan Keuangan/Kementrian Tingkat Satker	KPPN Tebing Tinggi	2
29	Kabupaten Batu Bara	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2018	KPPN Tanjungbalai	2
30	Kabupaten Batu Bara	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019	KPPN Tanjungbalai	2
31	Kabupaten Batu Bara	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019	KPPN Tanjungbalai	2
32	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Anggaran Semester II 2019 Kategori Pagu Sedang (2 Milyar s.d 4,5 Milyar)	KPPN Rantauprapat	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Kota Tanjung Balai	Satker terbaik 1 ketepatan waktu pengajuan GUP semester II Tahun 2019	KPPN Kota Tanjungbalai	1
34	Kota Binjai	Satker Terbaik dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019 dengan Nilai IKPA 98,32	DJPB Provinsi Sumatera Utara	-
35	Kota Binjai	Satker Terbaik dalam Pengelolaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II 2018	DJPB Provinsi Sumatera Utara	-
Provinsi Riau				
1	Kabupaten Kuantan Singingi	IKPA Semester I Kategori Pagu 3 M s.d. 7 M Rupiah	KPPN Rengat	3
2	Kabupaten Kuantan Singingi	IKPA Tahun 2018 Kategori di bawah 6 M	KPPN Rengat	3
3	Kabupaten Indragiri Hilir	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Kategori 3 - 7 Milyar	KPPN Rengat	2
4	Kabupaten Kampar	Satua Kerja Terbaik Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru Tahun 2018	KPPN Pekanbaru	3
5	Kabupaten Kampar	Kualitas Data Rekonsiliasi Tingkay UAKPA TW.III Tahun 2019 Lingkup KPPN Pekanbaru	KPPN Pekanbaru	5
Provinsi Jambi				
1	Kabupaten Sarolangun	Peringkat kedua penyerapan anggaran dan IKPA terbaik semester II Tahun 2018	KPPN	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kabupaten Batang Hari	10 Besar Tertinggi Nilai IKPA Lingkup KPPN Jambi	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi	4
Provinsi Sumatera Selatan				
1	Provinsi Sumatera Selatan	Sinergi dalam Pelaksanaan APBN dan Pengelolaan Keuangan Negara	Kanwil DJPB	-
2	Provinsi Sumatera Selatan	Apresiasi atas pengelolaan BMN kategori B	KPKNL Palembang	-
3	Provinsi Sumatera Selatan	Narasumber yang aktif memberikan informasi	PT. Radio Elshinta	-
4	Provinsi Sumatera Selatan	Kualitas laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Kanwil DJPB Sumatera Selatan	1
5	Provinsi Sumatera Selatan	Penghargaan atas Kepatuhan dan Tertib Administrasi Kepesertaan Program BPJS Ketenaga Kerjaan-Tenaga Honorar (BPJS Ketenagakerjaan)	BPJS Ketenaga Kerjaan	-
6	Kabupaten Muara Enim	Penghargaan SHPRB	Lembag Pemasarakatan IIB Kab. Muara Enim	-
7	Kabupaten Empat Lawang	Penghargaan Wajib Pajak Pendukung Penerimaan Pajak	KPP Pratama Lahat	-
Provinsi Bengkulu				
1	Provinsi Bengkulu	Satuan Kerja IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2018	Kanwil DJPB Bengkulu	1
2	Provinsi Bengkulu	Laporan Keuangan UAPPAW Tahun Anggaran 2018 Kelompok UAPPAW Besar	Kanwil DJPB Bengkulu	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kabupaten Bengkulu Utara	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019	KPPN Kota Bengkulu	7
4	Kabupaten Bengkulu Utara	Lomba Kebersihan dan Keapikan dan Kerapian KantorKantor	Pemda Kabupaten Bengkulu Utara	4
5	Kabupaten Bengkulu Utara	Pengelolaan UP Terbaik	KPPN Kota Bengkulu	1
6	Kabupaten Mukomuko	Laporan Keuangan UAKPA Tahun Anggaran 2018 KPPN Mukomuko	DJPB Kanwil Bengkulu	3
7	Kabupaten Mukomuko	Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik Semester I TA 2019 Lingkup KPPN Mukomuko	KPPN Mukomuko	1
8	Kabupaten Lebong	Satker Berkinerja Terbaik Berdasarkan Penilaian Kinerja UAKPA Semester II 2018	KPPN Curup	3
9	Kabupaten Lebong	Treasury Awards 2019 Terbaik Kedua Laporan Keuangan UAKPA TA 2018 KPPN Curup	DJPb Bengkulu	2
10	Kabupaten Lebong	Satker Berkinerja Terbaik Periode Semester I 2019	KPPN Curup	1
11	Kabupaten Lebong	Satker Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Kecil Berdasarkan Kinerja UAKPA TA 2019	KPPN Curup	3
12	Kabupaten Kepahiang	Satker Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Kecil Berdasarkan Nilai IKPA TA 2019	KPPN Curup	2
Provinsi Lampung				
1	Provinsi Lampung	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lampung 2019	Komisi Informasi Profinsi Lampung	-

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Provinsi Lampung	Pengelola Anggaran Terbaik TA 2018 pagu >6 milyar	KPPN Bandar LAMPUNG	8
3	Kabupaten Way Kanan	Penerapan Program Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019	KPPN Kotabumi	-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2019	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kep. Bangka Belitung	2
2	Kabupaten Bangka Selatan	Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Semester I 2019	KPPN Pangkalpinang	6
Provinsi Kepulauan Riau				
1	Provinsi Kepulauan Riau	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	1
2	Provinsi Kepulauan Riau	Pembina Wilayah Terbaik	Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	3
3	Kabupaten Natuna	Satker Terbaik Kriteria Nilai IKPA Tertinggi Semester I 2019 Pada Satker Lingkup Kab. Natuna Kategori Pagu Anggaran 1 Milyar s.d 10 Milyar	DJPB Kanwil Prov Kepulauan Riau KPPN Tanjungpinang	1
4	Kabupaten Natuna	Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2019 Se-Provinsi Kepri Kategori Pagu Anggaran sampai dengan 10 Milyar	DJPB Kanwil Prov. Kepri	4
Provinsi Jawa Barat				
1	Provinsi Jawa Barat	Piala Humas Jabar 2019	Pemprov Jabar	1

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Provinsi Jawa Barat	Tanginas Award - September 2019	KPPN Bandung II	-
3	Kabupaten Sukabumi	Penyampaian Lap. Wasdal Terbaik	KPKNL Bogor	3
4	Kabupaten Bandung	Satker dengan IKPA Terbaik Tahun 2018 kategori DIPA Kecil	KPPN Bandung 2	1
5	Kabupaten Bandung	Satker IKPA terbaik 2018 Wilayah KPPN Bandung 1 dan 2	Kanwil DJPB Jawa Barat	4
6	Kabupaten Cirebon	Satker Berkinerja Terbaik	KPPN Cirebon	3
7	Kabupaten Sumedang	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Kategori Pengelola Pagu DIPA Kecil	KPPN Sumedang	3
8	Kabupaten Purwakarta	Peringkat Kedua Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Sedang Lingkup KPPN Purwakarta Tahun Anggaran 2019	KPPN Purwakarta	2
Provinsi Jawa Tengah				
1	Kabupaten Banyumas	IKPA dengan pagu diatas 10 milyar tahun anggaran 2019	KPPN Purwokerto	3
2	Kabupaten Purbalingga	Satker dengan akurasi penarikan dana terbaik kategori Pagu DIPA dibawah 10 Milyar Tahun Anggaran 2019	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto	2
3	Kabupaten Magelang	Best Performance Semester 1 Tahun 2019 Kategori Pagu DIPA >4 - < 10 M	KPPN Magelang	1
4	Kabupaten Magelang	Piagam Penghargaan Best Performance Semester 2 th 2019	KPPN Magelang	2
5	Kabupaten Karanganyar	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	KPPN Sragen	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kabupaten Blora	Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik	KPPN Purwodadi	1
7	Kabupaten Pati	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	KPPN Pati	3
8	Kabupaten Batang	Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2019	KPPN Pekalongan	3
Provinsi DI Yogyakarta				
1	Kabupaten Kulon Progo	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates	3
Provinsi Jawa Timur				
1	Provinsi Jawa Timur	Satker Berkinerja Baik Tahun 2019	KPPN Surabaya I/DJPB	1
2	Kabupaten Banyuwangi	Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup KPPN Banyuwangi Tahun Anggaran 2019	KPPN Banyuwangi	2
3	Kabupaten Gresik	Laporan Pelaksanaan Anggaran Sangat Baik	KPPN Surabaya 1 Surabaya	-
4	Kota Blitar	Akses HAI DJPB TA 2019	KPPN Blitar	2
5	Kota Blitar	Perencanaan Penarikan Dana Harian Terakurat TA 2019	KPPN Blitar	1
6	Kota Blitar	Terakurat Rekon LK dan Konsistensi LPJ Bendahara dalam Pengelolaan APBN Semester 1 TA 2019	KPPN Blitar	1
7	Kota Pasuruan	Piagam Penghargaan PRISMA (Pelayanan Prima Satker Utama)	KPPN Malang	3

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Banten				
1	Kota Serang	IKPA Terbaik	KPPN Serang	2
Provinsi Bali				
1	Provinsi Bali	Satker Terbaik Kategori Khusus Penyampaian Laporan Saldo Rekening Triwulan I Tahun 2019	KPPN Denpasar	1
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terbaik Pertama dalam Penyusunan LK Tingkat UPPA-W NTB	Kanwil DJPb Provinsi NTB	1
2	Kabupaten Lombok Barat	Terbaik kesembilan Nilai IKPA tahun 2019	Kanwil DJPb NTB	9
3	Kabupaten Lombok Timur	Satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik (kategori pagu s.d Rp 50 milyar)	KPPN Selong	3
4	Kabupaten Lombok Timur	Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik tahun 2019	KPPN Selong	1
5	Kabupaten Lombok Timur	Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran periode s.d Juni 2019	KPPN Selong	3
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
1	Kabupaten Sumba Barat	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sd Triwulan III 2019	KPPN Waingapu	2
2	Kabupaten Sumba Barat	Kontribusi Pembinaan Statistik Sektoral di Kabupaten Sumba Barat	Bupati Sumba Barat	-

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Triwulan I TA 2019	Kepala KPPN Atambua	3
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Triwulan II TA 2019	Kepala KPPN Atambua	3
5	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Triwulan III TA 2019	Kepala KPPN Atambua	3
6	Kabupaten Timor Tengah Utara	Lomba Kebersihan dan Keindahan Antar OPD/ Instansi Se-Kecamatan Kota Kefamenanu dalam rangka Perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten TTU Tahun 2019	Bupati Timor Tengah Utara	5
7	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kategori Satuan Kerja dengan IKPA Tertinggi	Kepala KPPN Atambua	3
8	Kabupaten Rote Ndao	Satker dengan Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tertinggi Semester I Tahun 2019	Kepala KPPN Kupang	-
9	Kabupaten Rote Ndao	Satker dengan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tertinggi pada Semester II Tahun 2019	Kepala KPPN Kupang	-
Provinsi Kalimantan Barat				
1	Kabupaten Bengkayang	Satker yang meraih nilai terbaik Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2018 dalam wilayah Pembayaran KPPN Singkawang	Kepala KPPN Singkawang	2
2	Kabupaten Bengkayang	Satker Terbaik se-Kalimantan Barat atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018	Kepala Kanwil Perbendaharaan	6

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Provinsi Kalimantan Barat	
3	Kabupaten Bengkayang	Satker yang meraih nilai terbaik Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2019 dalam Wilayah Pembayaran KPPN Singkawang	Kepala KPPN Singkawang	2
4	Kabupaten Bengkayang	Satker Terbaik se-Kalimantan Barat atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2019	Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat	5
5	Kabupaten Bengkayang	Satker yang meraih nilai 99,70 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2019 wilayah Pembayaran KPPN Singkawang	Kepala KPPN Singkawang	1
6	Kabupaten Melawi	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	KPPN	4
7	Kota Singkawang	Satker Terbaik Pengelola Anggaran Semester I Tahun 2019 KKPN Singkawang	KPPN Singkawang	1
8	Kota Singkawang	Satker Terbaik Pengelola Anggaran Semester I Tahun 2019	KPPN Singkawang	3
Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Provinsi Kalimantan Tengah	Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester 2 TA 2018 Satker Kategori Pagu Besar Lingkup KPPN Palangkaraya	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	2
2	Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Publik Menuju Informatif	Gubernur Kalimantan Tengah	3

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terbaik Ketiga IKPA Smester II TA 2018	DJPBn Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah	3
4	Kabupaten Sukamara	Terbaik Kelima dengan Nilai 99,65 (Sangat Baik) Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester II TA 2019 Klasifikasi Pagu Sedang Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	5
5	Kabupaten Lamandau	Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Produksi (WBK)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-
6	Kabupaten Lamandau	Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester I TA 2019 Lingkup Kab. Lamandau	Kepala KPPN Pangkalan Bun	-
7	Kabupaten Lamandau	Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester II TA 2018 Lingkup Kab. Lamandau	Kepala KPPN Pangkalan Bun	-
8	Kabupaten Seruyan	Pencapaian Terbaik Ketiga Indikator kinerja Pengelola Anggaran Periode Triwulan III 2019 Lingkup KPPN Sampit	KPPN Sampit	3
9	Kabupaten Barito Timur	Piagam Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2019 Klasifikasi Pagu Besar Lingkup KPPN Buntok	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kabupaten Barito Timur	Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester II Tahun Anggaran 2018 Kalsifikasi Pagu Kecil Lingkup KPPN Buntok	Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	1
Provinsi Kalimantan Selatan				
1	Provinsi Kalimantan Selatan	Penghargaan Satker Kinerja Anggaran diatas 95 Semester II Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI _ DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	-
2	Provinsi Kalimantan Selatan	Recognizing Our Loyal Customer Of Government Award 2019	Hotel Roditha Banjarbaru	-
3	Kabupaten Banjar	Satuan Kinerja Perolehan LKPA Semester I-2019 Kategori DIPA Sedang	KPPN Banjarmasin	3
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Lebih dari 2,4 Miliar Rupiah	KPPN Tanjung	2
5	Kabupaten Tanah Bumbu	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2019	KPPN Kotabaru	2
Provinsi Kalimantan Timur				
1	Provinsi Kalimantan Timur	Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik via Website di Provinsi Kaliman Timur dalam ajang Web Award Badan Publik 2019	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	1



No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Provinsi Kalimantan Timur	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker	Kanwil DJPb Prowinsi Kalimantan Timur	-
Provinsi Kalimantan Utara				
1	Provinsi Kalimantan Utara	Penghargaan Satker dengan Tingkat Akurasi Perkiraan Pencairan Dana Harian	KPPN Tanjung Selor	3
Provinsi Sulawesi Utara				
1	Kabupaten Minahasa Utara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Periode Triwulan I Tahun 2019 dengan Kategori Bobot IKPA 70% atau lebih	KPPN Bitung	3
2	Kota Tomohon	Satuan Kerja Terbaik Tahun 2019 Kategori Pagu Dibawah 10 Milyar KPPN Manado	KPPN Manado	3
Provinsi Sulawesi Tengah				
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah Berkinerja Terbaik Tahun 2019 Kategori Wilayah Kerja Besar	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah	3
2	Provinsi Sulawesi Tengah	Lomba Kebersihan dan Keindahan Kantor Kategori Lembaga Vertikal/Kementerian dalam rangka Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah Ke-55 Tahun 2019	Gubernur Sulawesi Tengah	Juara Umum
3	Kabupaten Banggai	Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019	KPPN Luwuk	-
4	Kabupaten Buol	Penghargaan IKPA TW III 2019	KPPN Tolitoli	2

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Sulawesi Tenggara				
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-
2	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office)	Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara	Grade Biru
3	Provinsi Sulawesi Tenggara	Treasury Award Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja UAPPAW Terbaik atas Penilaian Laporan Keuangan UAPPAW Periode Tahun 2018	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara	3
4	Kabupaten Kolaka	Treasury Award Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2018 Kategori Satker dengan Pagu Anggaran Kecil	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
5	Kabupaten Bombana	Treasury Award TA 2018 Kemenkeu	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara	3
6	Kabupaten Bombana	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III TA 2019	KPPN Kendari	1
7	Kabupaten Kolaka Utara	Pelaksana Anggaran Terbaik II Tahun 2019 Kategori Pagu Menengah	KPPN Kolaka	2
8	Kabupaten Konawe Utara	Penghargaan Dari Bupati Konawe Utara atas Kerjasamanya Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Dalam Publikasi Data Tahunan Kabupaten Konawe Utara	Bupati Konawe Utara	-

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kabupaten Kolaka Timur	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2019 Kategori Pagu Anggaran Kecil	Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara	2
10	Kabupaten Kolaka Timur	Pelaksana Anggaran Terbaik Tahun 2019 Kategori Pagu Menengah	KPPN Kolaka	1
11	Kota Kendari	Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-
12	Kota Baubau	Penilaian Kinerja Rekonsiliasi dan Pertanggungjawaban Bendahara	KPPN Baubau	2
Provinsi Gorontalo				
1	Provinsi Gorontalo	Treasury Award 2019-Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Besar	DJPB Kanwil Gorontalo	2
2	Provinsi Gorontalo	Treasury Award 2019-Penghargaan Khusus Mitra Kerja Mengawal APBN Membangun Negeri	DJPB Kanwil Gorontalo	-
3	Provinsi Gorontalo	UAPPA-W dengan partisipasi ter-Aktif Tahun 2019	DJPB Kanwil Gorontalo	-
4	Kabupaten Boalemo	Satker Terbaik dalam Penyampaian Laporan Saldo Rekening Lingkup KPPN Marisa Semester I TA 2019	KPPN Marisa	1
5	Kabupaten Boalemo	Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil Treasury Awards 2019	DJPB Kanwil Provinsi Gorontalo	2
6	Kabupaten Boalemo	Satker dengan Laporan Saldo Rekening Terbaik	KPPN Marisa	1

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kabupaten Gorontalo Utara	POR KORPRI Cabang Olahraga Catur Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019	Bupati Gorontalo Utara	1
8	Kabupaten Gorontalo Utara	POR KORPRI Cabang Olahraga Bulu Tangkis Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019	Bupati Gorontalo Utara	3
9	Kabupaten Gorontalo Utara	POR KORPRI Cabang Olahraga Tenis Meja Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019	Bupati Gorontalo Utara	3
Provinsi Sulawesi Barat				
1	Kabupaten Majene	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene	1
2	Kabupaten Polewali Mandar	Penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun 2019	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat	4
3	Kabupaten Polewali Mandar	Kinerja pelaksanaan Anggaran semester I	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene	3
4	Kabupaten Polewali Mandar	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene	2
5	Kabupaten Mamasa	Satuan Kerja Berkinerja Sangat Baik Kategori Satker Besar Tahun 2019.	Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	5

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kabupaten Mamasa	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	KPPN Majene	4
Provinsi Maluku				
1	Provinsi Maluku	Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2018	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku	2
2	Provinsi Maluku	Penghargaan IKPA Terbaik TA 2019 (Pagu Anggaran Sedang)	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku	3
3	Kabupaten Maluku Tenggara	Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KKPN Tual untuk Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Dana DIPA TA 2019 sampai dengan 4 M	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TUAL	3
4	Kabupaten Maluku Barat Daya	Satker terbaik Penilaian IKPA Semester I 2019	KPPN Saumlaki	1
5	Kabupaten Maluku Barat Daya	Satker Terbaik Penilaian IKPA s.d 30 November 2019	KPPN Saumlaki	1
Provinsi Maluku Utara				
1	Provinsi Maluku Utara	Penyaji Laporan Keuangan TA 2018	Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara	1
2	Kabupaten Halmahera Barat	Kinerja Pelaksana Anggaran Terbaik Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019	Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara	-
3	Kabupaten Halmahera Utara	Kesediaan sebagai Pemateri dalam Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019	KPPN Tobelo	-
4	Kabupaten Halmahera Timur	IKPA Terbaik Semester I TA 2019	Kepala KPPN Tobelo	3

No	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kabupaten Halmahera Timur	LPJ Terbaik Semester I TA 2019	Kepala KPPN Tobelo	1
6	Kabupaten Halmahera Timur	IKPA Terbaik Semester II TA 2019	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara	3
7	Kabupaten Halmahera Timur	LPJ Terbaik Semester II TA 2019	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara	1
Provinsi Papua Barat				
1	Kota Sorong	Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Terbaik Semester I	KPPN Sorong	1
2	Kota Sorong	Pelaporan Keuangan Satuan Kerja	KPPN Sorong	1
3	Kota Sorong	Kategori Satker 10-11 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	KPPN Sorong	1



Peringkat II sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019
(Pusdiklat BPS)



RADAR PADI Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
(meraih peringkat Top 45)



Penghargaan OpenGov terkait aplikasi Wilkerstat BPS



Juara II Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara



Predikat "Baik" dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Pengelola Kepegawaian Terbaik Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award



Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN



Prestasi mahasiswa Polstat STIS dalam ajang kompetisi National Statistics Challenge (NSC) di Universitas Brawijaya
 Kompetisi Infografis: Juara 3
 Kompetisi Analisis Data: menyabet lima gelar juara, yaitu: Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara Harapan 1 dan, Juara Harapan 2



Meraih peringkat ke-XIII "Memuaskan" kategori LPNK berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : bpsHQ@bps.go.id